cc BY NC ND

41613

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KEPALA LOKAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ZUL IRMA INDRA

NIM: 016759938

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutif maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru, 2013

Yang Mendaftar,

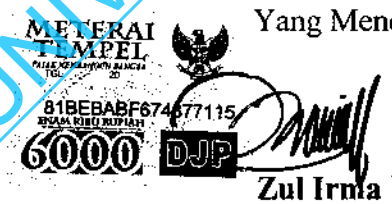

Zul Irma Indra
NIM. 016759938

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KELAPA LOKAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Penyusun TAPM	:	Zul Irma Indra
UPBJJ	:	Pekanbaru
NIM	:	016759938
Program Study	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. Febri Yuliani, M.Si
NIP. 19770203 200501 2 003

Pembimbing II,

Dr. Achmad Hidir, M.Si
NIP. 19640409 199009 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu /
Program Magister Administrasi Publik

Florentina Ratih Wulandari,S.IP, M.Si
NIP.19710609 199802 2 001

Direktur
Program Pascasarjana,

Suciati, M.Sc. Ph.d
NIP.19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA	:	**ZUL IRMA INDRA**
NIM	:	**016759938**
PROGRAM STUDI	:	**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**
JUDUL TAPM	:	**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KELAPA LOKAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Pada :

Hari/ tanggal	:	Sabtu, 26 Oktober 2013
Waktu	:	14.00 – 15.30 (WIB)
Tempat	:	Ruang Sidang UPBJJ- UT Pekanbaru

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	:	Drs. ELFIS SUANTO, M.Si	( )
Penguji Ahli	:	DJAKA PERMANA, M.Si, Ph.D	( )
Pembimbing I	:	Dr. FEBRI YULIANI, M.Si	( )
Pembimbing II	:	Dr. ACHMAD HIDIR, M.Si	( )

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

PENDAFTARAN WISUDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	ZUL IRMA INDRA
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Tempat Lahir	:	Pekantua
Tanggal / Tahun Lahir	:	10 November 1980
NIM	:	016759938
Tanggal Ujian Sidang	:	26 Oktober 2013
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir
Dosen Pembimbing I	:	Dr. Febri Yuliani, M.Si
Dosen Pembimbing II	:	Dr. Achmad Hidir, M.Si
Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Alamat Tetap	:	Jl. Pangeran Diponegoro No. 743 Tembilahan
No. Telp / HP	:	085271592605
Hadir dalam upacara wisuda	:	YA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2013

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru

Drs. Elfis Suanto, M.Si
Nip. 196610021 99103 1 003

Yang Mendaftar,

Zul Irma Indra
Nim. 016759938

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Zul Irma Indra
NIM	:	0169938
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul Tesis (TAPM)	:	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UTA dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2013

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru

Drs. Elfis Suanto, M.Si
Nip. 19661002 199103 1 003

Mahasiswa,

Zul Irma Indra
Nim. 016759938

Ketua Bidang Ilmu / Program Magister
Manajemen Administrasi Publik

FlorentinaRatihWulandari, S.Ip, M.Si
Nip. 19710609 199802 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir

Zul Irma Indra

Universitas Terbuka

Email : zulirma.indra80@yahoo.com

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala (fenomena) menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

Adapun subjek dan objek penelitian ini adalah Pegawai pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Anggota DPRD, penerima program meliputi masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan maksimal karena masih ada kendala antara lain : Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani kelapa lokal dalam mengelola perkebunan kelapa lokal, rendahnya kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan. Faktor penghambat dalam implementasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah kurangnya pengawasan dari instansi terkait dalam melaksanakan program perkebunan, pendidikan petani kelapa lokal yang masih berpendidikan rendah kurang maksimalnya sosialisasi program pemerintah kepada petani kelapa. Faktor pendukung dalam implementasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah adanya aturan atau regulasi yang memberikan peluang kepada petani kelapa dalam peningkatan pendapatan melalui alokasi dana, tersedianya sarana dan prasarana perkebunan rakyat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

ABSTRACT

Implementation Of Local Government Policy To Increase Revenue Local Coconut Farmers In Indragiri Hilir

Zul Irma Indra

Universitas Terbuka

Email : zulirma.indra80@yahoo.com

Keyword : Policy Implementation, Communications, Resource, Attitude Local Coconut Farmers' Income

This study was conducted to describe and analyze the implementation of Government policy to increase the income of local coconut farmers in Indragiri Hilir and analyze the factors driving and inhibiting the implementation of government policy to increase the income of local coconut farmers in Indragiri Hilir.

This study uses descriptive qualitative method is methods used to find the broadest knowledge the research object at a certain time. This study is intended gathering information, the status of a variable or theme, symptoms or circumstances that exist is state phenomenon according to what it is at the time the study was conducted.

As for the subject and the object of this study is employees at the Department of Plantation, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, beneficiaries involve community and community leaders.

Based on the analysis conducted in this study, concluded that Implementation of Government policy to increase the income of local coconut farmers in Indragiri Hilir not running optimally because there are constraints, such as Lack of knowledge and skills of local coconut farmers in managing local palm plantations, low institutional capacity of farmers to access capital. Limiting factor in the implementation of local coconut farmers' income improvement is lack of supervision of the agencies involved in implementing the program of plantation, education of local coconut farmers are still less educated, maximal dissemination of government programs of the farmers. The supporting factors in the implementation of local coconut farmers' income improvement is the existence of a rule or regulation which provides opportunities for coconut farmers in increased revenues through allocations and availability of infrastructure, community plantations.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

KATA PENGANTAR

Puji sukur penulis sampaikan atas karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KELAPA LOKAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik pada Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Elfis Suanto. M.Si selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru
2. Ibu Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I yang memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada peneliti dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini
3. Bapak Dr. Achmad Hidir, M.SI, selaku pembimbing II yang memberikan arahan kepada peneliti dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini
4. Ibnu Sazili, SE, Suami yang selalu mensupport dan membantu dalam tugas akhir
5. Orang tua kami dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis.

Penulis berikan penghargaan kepada sahabat, rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran dalam penyelesaian TAPM ini dengan tulus mengucapkan terimakasih atas segala perhatiannya. Penulis do'akan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas jasa, motivasi serta bantuan yang telah diberikan.

Penulis,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

DAFTAR ISI

Halaman

ABTRAKSI I
KATA PENGANTAR III
DAFTAR ISI IV
DAFTAR TABEL VI
DAFTAR GAMBAR VII

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah 1
B Perumusan Masalah 8
C Tujuan Penelitian 9
D Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu 10
B Implementasi Kebijakan 18
C Pendekatan-Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Publik 28
D Konsep Implementasi Kebijakan Publik 33
E Model Implementasi Kebijakan Publik 41
F Perkebunan Kelapa 50
G Kerangka Pemikiran 52
H Fokus Penelitian 53

BAB III METODE PENELITIAN

A Desain Penelitian 56
B Subjek Dan Objek Penelitian 56
C Instrumen Penelitian 58

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

D Prosedur Pengumpulan Data..... 58

E Metode Analisis Data 60

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A Deskripsi Objek Penelitian 62

B Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir 71

C Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 di Kabupaten Indragiri Hilir 84

D Faktor Lain..... 96

E Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupten Indragiri Hilir..... 99

F Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal..... 104

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A Simpulan 112

B Saran 113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Sebagai Petani Kelapa Lokal	3
1.2	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Sebagai Petani Kelapa Lokal Penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2011.....	4
4.1	Kondisi Perkebunan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.....	66
4.2	Program Kerja Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal.....	67
4.3	Jumlah Petani Yang Mengikuti Pelatihan Tahun 2009 – 2012.....	72
4.4	Jumlah Kebun (ha) Yang Diremajakan Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	77
4.5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.....	80
4.6	Komposisi Jumlah Penyuluh Perkebunan (PNS) pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Pendidikan Formal Tahun 2012.....	91

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan.....	22
2.2	Hubungan variable yang mempengaruhi implementasi.....	41
2.3	Model implementasi kebijakan Grindle.....	44
2.4	Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	45
2.5	Model Implementasi Kebijakan Mazamanian dan Sebatier.....	49
2.6	Kerangka Pemikiran	52

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Pembangunan perkebunan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain mampu menjawab tantangan-tantangan globalisasi. Usaha perkebunan yang prospektif terbukti sangat membantu memperbesar dan meningkatkan pendapatan negara, daerah dan masyarakat. Perkebunan merupakan penghasil devisa, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, sumber bahan baku industri, pengembangan ekonomi wilayah, dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paradigma yang baru, pembangunan perkebunan adalah pensejahteraan manusia dan masyarakat melalui pembangunan komoditas perkebunan. Jelas terlihat bahwa masyarakat merupakan subjek pembangunan, sedangkan komoditas perkebunan menjadi sarananya. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidak semua keberhasilan dalam meningkatkan produksi perkebunan berdampak pada peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perkebunan. Keberhasilan pembangunan perkebunan harus diukur dari peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku lainnnya.

Komoditas kelapa di Indonesia memiliki peranan yang sangat strategis baik dari segi sosial budaya, penerimaan devisa negara, sumber pendapatan petani dan lapangan kerja yang sangat potensial dan tidak kalah pentingnya sebagai sumber utama minyak makan dalam negeri. Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani. Dari sisi pendapatan usaha tani belum mampu menunjang kehidupan keluarga petani secara layak.

Hasil studi yang dilaksanakan di sentra-sentra produksi kelapa di Indonesia menunjukkan bahwa kehidupan keluarga petani kelapa secara umum sampai saat ini masih berada dibawah garis kemiskinan (Tarigans, 2002a). Bavappa et al. (1995) melaporkan bahwa proporsi pendapatan petani kelapa di Indonesia sangat kecil hanya 20% dari total pendapatannya. Disamping itu, usaha-usaha yang telah dilaksanakan pemerintah dalam periode tiga dekade terakhir belum sepenuhnya memberikan perbaikan taraf hidup petani kelapa. Kenyataan demikian, menunjukkan peranan ekonomi komoditas kelapa belum optimal bila dilihat dari segi pendapatan petani, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan sumber devisa negara secara nasional.

Sektor perkebunan merupakan sumber utama tulang punggung perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan selama ini adalah kelapa lokal, kelapa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hibrida, kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan pinang. Dari berbagai komoditas itu, kelapa lokal merupakan primadona yang banyak dibudidayakan oleh petani. Potensi wilayah merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Bila ditinjau dari arah pembangunan dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra produksi kelapa di Indonesia dan sebagian besar penduduknya berusaha di sektor kelapa sebagai mata pencaharian utamanya. Hal ini tercermin pada data berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Sebagai Petani Kelapa Lokal

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Petani Kelapa Lokal
1	Keritang	63,636	5,657
2	Kemuning	30,697	4
3	Reteh	43,722	5,175
4	Sungai Batang	12,248	2,937
5	Enok	34,129	9,002
6	Tanah Merah	31,009	4,277
7	Kuala Indragiri	19,349	5,247
8	Concong	13,258	3,394
9	Tembilahan	72,001	1,859
10	Tembilahan Hulu	44,177	741
11	Tempuling	30,579	2,074
12	Kempas	33,750	1,245
13	Batang Tuaka	27,244	4,372
14	Gaung Anak Serka	22,100	3,145
15	Mandah	39,938	11,269
16	Kateman	45,350	7,741
17	Pelangiran	43,568	3,209
18	Teluk Belengkong	16,690	714
19	Pulau Burung	22,355	2,219
20	Gaung	39,918	5,835
Jumlah		685,718	80,116

Sumber data : BPS Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2012

UNIVERSITAS TERBUKA

Dari tabel di atas, dapat disampaikan bahwa banyak penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang menggantungkan hidupnya pada perkebunan kelapa lokal totalnya 80.116 orang (11,7%). Selain itu, banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya pada petani kelapa lokal ini sehingga mau tidak mau Pemerintah harus bekerja lebih ekstra agar dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal ini yang pada gilirannya dapat meningkatakan Pendapatan Asli Daerah. Luas penggunaan lahan yang begitu besar di sektor perkebunan selayaknya memberikan kontribusi yang besar dalam pengelolaan meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal. Adapun data tentang penggunaan lahan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Sebagai Petani Kelapa Lokal
Penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	52.712	4,54
2.	Pekarangan	49.864	4,30
3.	Tegalan/kebun	92.742	7,99
4.	Lading/Huma	861	0,07
5.	Sementara tidak diusahakan	49.130	4,23
6.	Pengembalaan / padang rumput	2.550	0,22
7.	Hutan rakyat	21.785	1,88
8.	Hutan Negara	264.085	22,75
9.	Perkebunan	593.706	51,16
10.	Rawa-rawa	10.154	0,87
11.	Tambak/Kolam/Tebat/ Empang	1.202	0,10
12.	Lain-lain	21.806	1,88
Jumlah		1.160.597	100,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2012

Luas perkebunan mencapai 593.706 ha yang didominasi oleh perkebunan kelapa yang mencapai luas 430.442 ha atau 72,50 persen dari luas

UNIVERSITAS TERBUKA

lahan perkebunan yang ada. Dengan lahan perkebunan yang luas ini merupakan suatu potensi yang perlu dikelola dengan tepat untuk meningkatkan pendapatan petani. Ironisnya nasib petani kelapa di Kabupaten Indargiri Hilir (Inhil) kian terpuruk, pasalnya semakin lama semakin hari harga kelapa kopra terus anjlok dibanding dengan harga sebelumnya. Koran Riau Pos edisi 13 Maret 2012 menyatakan bahkan saat ini harga kelapa dalam 1 pikulnya hanya berkisar antara Rp250 ribu hingga mencapai Rp. 300 ribu untuk kadar 70 persen sedangkan untuk kadar 100 persen hanya dihargai sebesar Rp. 400 ribu. Harga tersebut membuat kalangan petani kelapa semakin menjerit kerena dinilai sangat tidak sesuai dengan biaya ongkos operasional yang sudah dikeluarkan oleh para petani. Akibat anjloknya harga kelapa kopra saat ini, banyak kaum petani kelapa seperti di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuindra yang akhirnya membiarkan lahan kebun mereka. Bahkan hampir sebagian besar para petani kelapa kopra banyak yang beralih profesi mengingat biaya antara pemeliharaannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil panennya.

Ada beberapa penyebab produktifitas kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini mengalami penurunan, yaitu :

1. Umur kebun kelapa yang sudah tua;
2. Kurangnya tepat pemilihan pupuk;
3. Perawatan yang kurang intensif;
4. Pemilihan lokasi kebun yang dekat dengan sungai sehingga menyebabkan kebun kelapa mudah terendam air;

UNIVERSITAS TERBUKA

5. Kondisi geografis yang berjauhan;
6. Sarana jalan yang belum memadai;
7. Letak perusahaan yang jauh;
8. Transportasi yang sulit karena masih tergantung dengan kondisi alam yaitu pasang surut.

Selain beberapa penyebab di atas, petani juga lebih banyak memfokuskan produk kelapa hanya pada kopra semata, sehingga jika harga kopra turun maka pendapatan petani juga akan menurun. Seharusnya kelapa lokal dideversifikasi baik secara horizontal dengan tanaman sela diantara pohon-pohon kelapa dan secara vertikal dengan mengolahnya menjadi minyak goreng, gula merah, nata de coco, tempurung yang dapat diolah menjadi bahan kerajinan, dan sabut yang dapat diolah menjadi bahan pembuatan jok mobil. Selain itu kelapa juga dapat diolah menjadi bahan setengah jadi berupa arang kelapa yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pengelolaan sektor perkebunan ini perlu dukungan dari Pemerintah untuk dapat meningkatkan produktifitas kelapa lokal agar masyarakat khususnya petani kelapa dapat meningkat pendapatannya. Ada beberapa Program Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2009 – 2013, yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani :

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis;
b. Terlaksananya pengembangan sumberdaya dan kelembagaan usaha pertanian;
c. Meningkatnya produktifitas petani dan mutu produksi hasil-hasil pertanian;
d. Meningkatnya daya dukung sumberdaya lahan dan berkembangnya usaha pertanian rakyat.

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan :

a. Meningkatnya penerapan teknologi modern dan tepat guna dalam berusaha tani.
b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengembangan dan peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
c. Meningkatnya fungsionalisasi prasarana dan sarana penerapan teknologi modern dan tepat guna.
d. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi pertanian/perkebunan modern dan tepat guna.
e. Terlaksananya pembangunan tanggul mekanik.
f. Terlaksananya pembangunan tanggul manual.
g. Terlaksananya normalisasi trio tata air.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan :

a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan produktivitas petani.
b. Terealisasinya bantuan sarana peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
c. Teridentifikasi dan terpantaunya penggunaan dan pemasaran bibit unggul yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
d. Terjaminnya keselamatan dan mutu produk bibit unggul pertanian/perkebunan yang akan digunakan oleh petani.
e. Terealisasinya rencana pengaturan penggunaan dan alih fungsi lahan pertanian.

Dengan berbagai kebijakan ini ternyata masih belum dapat mengangkat taraf kehidupan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul : "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir."

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

B. Perumusan Masalah

Dengan lahan perkebunan kelapa yang sangat luas, seharusnya sektor perkebunan kelapa dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. Kebijakan Pemerintah selayaknya dapat meningkatkan produktifitas kelapa dengan mendiversifikasi hasil kelapa yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. Kelapa dapat dideversifikasi secara Vertikal dan Horizontal. Selain itu, kelapa juga bisa dibuat bahan setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dukungan dari Pemerintah dalam bentuk program kerja guna membantu petani kelapa dalam memaksimalkan produktifitas kelapa dan diversifikasi kelapa. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal pada Kabupaten Indragiri Hilir, dengan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor-faktor pendorong dan penghambat proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir?

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai masukan kepada pihak Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal pada Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Sebagai bahan masukan bagi stake holder (Pemerintah, pihak swasta dan Petani Kelapa) untuk mengusahakan formula yang tepat dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal;
3. Sebagai referensi kepada pembaca agar dapat mengembangkan dan mengaplikasikan penelitian ini serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal pada Kabupaten Indragiri Hilir peneliti sebelumnya:

1. M Yusuf pada Tahun 2004 dengan judul penelitian " Strategi Dan Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indragiri Hilir " dimana masalah yang dikaji dalam penelitian ini diarahkan pada kemampuan sub sektor tanaman perkebunan kelapa sawit untuk memberikan manfaat optimal kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya (1) Pengusaha Perkebunan (2) Masyarakat baik yang berada di sekitar perkebunan maupun sebagai Petani (3) Pemerintah. Berdasarkan hasil analisis PDRB dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa sub sektor tanaman perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir memegang peranan penting/mampu memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam pembentukan PDRB yaitu lebih dari 43% untuk produk sektor pertanian dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena bersifat padat karya, untuk Tahun 2002 kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 22.063 orang. Dari analisis QSPM tersebut menghasilkan bahwa strategi yang paling utama dilaksanakan dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir adalah strategi kemitraan dengan pihak lain.

Sebagaimana penelitian M. Yusuf diatas, dalam beberapa hal mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Salah satu persamaan tersebut adalah fokus kajian yang berkaitan dengan analisis di sektor perkebunan yang mempengaruhi pendapatan masyarakat Indragiri Hilir sedangkan perbedaannya adalah dari terletak pada alat analisis yang digunakan dimana M. Yusuf menggunakan QSPM sedangkan dalam penelitian menggunakan alat analisis berupa deskripsi dari implementasi kebijakan.

2. Doah Dekok Tarigans Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesian *Centre for Estate Crops Research and Development* pada Tahun 2005 dengan judul jurnal " Diversifikasi Usaha tani Kelapa Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani; Komoditas kelapa bagi masyarakat Indonesia memiliki peranan multiguna dan strategis, karena terkait dengan berbagai segi kehidupan. Dari segi peranan ekonomi tanaman kelapa secara nasional belum mencapai tingkat yang optimal terutama apabila dilihat dari segi pendapatan petani, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan pendapatan devisa negara. Pendapatan usahatani kelapa yang dikelola petani, belum mampu menunjang kehidupan keluarga petani secara layak sehingga petani kelapa secara nasional masih hidup di bawah garis kemiskinan. Suatu kenyataan dimana proporsi pendapatan petani hanya 20% dari total pendapatan

UNIVERSITAS TERBUKA

keluarga. Diversifikasi usahatani secara horizontal merupakan salah satu bentuk usahatani kelapa dimana tanaman sela semusim dan tanaman tahunan atau keduanya dirakit menjadi pola usahatani campuran sehingga dalam usahatani dikembangkan beberapa tanaman yang prospektif sebagai sumber pendapatan. Tanaman sela yang diintrodusi diseleksi berdasarkan pada peluang pasar sehingga mampu berperan sebagai sumber pendapatan yang potensial. Diversifikasi usahatani secara vertikal berarti menganeka ragamkan produk usahatani secara efisien disertai dengan peningkatan mutu sehingga produk lebih kompetitif dan memberikan nilai tambah. Penganeka ragaman produk olahan usahatani yang berpeluang memberikan tambahan pendapatan antaranya pengolahan air kelapa menjadi nata de coco, pengolahan tempurung, pengolahan sabut kelapa menjadi berbagai bentuk produk seperti tali, karpet, jok mobil, kursi atau *geotextile*, pembuatan berbagai kerajinan tangan berbahan baku tempurung, pengolahan minyak kelapa murni (virgin coconut oil) dan pengolahan gula kelapa. Pada tingkat petani yang memiliki produk olahan yang prospektif untuk dikembangkan adalah minyak kelapa murni (VCO) dan gula kelapa. Namun demikian, pengembangan produk olahan minyak kelapa murni terbatas dapat diterapkan pada daerah-daerah sentra produksi yang mampu mendukung tersedianya fasilitas pengolahan yang sederhana, terjangkau dan peluang pemasaran produk yang dihasilkan, sedangkan produk gula kelapa mudah diproses pada tingkat petani karena tekhnik pengolahannya sederhana serta pemasaran dan harganya yang mendukung

UNIVERSITAS TERBUKA

disemua sentra produksi kelapa. Pengembangan produk olahan gula kelapa pada tingkat petani mampu memberikan kontribusipendapatan 69-96% terhadap total pendapatan usahatani, dan lebih kompetetif dibandingkan dengan produk olahan kopra. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di negara-negara produsen kelapa dunia (India, Filipina, Sri Langka) termasuk Indonesia menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi usahatani kelapa mampu meningkatkan produktifitas.

Adapun penelitian Doah Dekok diatas didapat bahwa penelitian memiliki persamaan dalam hal objek penelitian yaitu kelapa dan penekanannya adalah divesifikasi produk kelapa untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa sedangkan perbedaanya pada konsep teori yaitu teori tentang perkebunan kelapa dan implementasi kebijakan.

3. Kuswari, pada tahun 2005 dengan judul penelitian pengembangan agribisnis kelapa dalam rangka pengurangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pembangunan perkebunan kelapa merupakan bagian integral dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir dimana kawasan pedesaan yang jumlahnya sekitar 75 % dari total penduduk. Potensi pengembangan dan lahan yang tersedia masih cukup luas, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya produktivitas, meningkatnya luas kebun kritis, harga produk primer kelapa rendah, harga input produksi mahal, keterbatasan modal usaha tani, manajemen usaha tani yang belum efisien dan kurangnya akses petani dalam pemasaran hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkebunan kelapa

UNIVERSITAS TERBUKA

memberikan sumbangan sebesar 11,50 persen terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian Kuswari diatas memiliki persamaan penelitian terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian yakni Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni pembahasan analisis potensi pengembangan agribisnis kelapa dalam rangka pengurangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan konsep teori ekonomi sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep teori kebijakan publik.

4. Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra, Tahun 2006, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada Tahun 2006 dengan judul jurnal penelitian "Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan". Dalam penelitiannya sektor pertanian, khususnya usaha tani lahan sawah, memiliki nilai multifungsi yang besar dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keberlanjutan pertanian dengan program lahan pertanian abadi akan dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan absolut tahun 2004 mencapai 36,10 juta orang, sebagian besar tinggal di pedesaan (68,70%) dengan kegiatan utama (60%) di sektor pertanian. Kemampuan sektor pertanian dalam peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan akan ditentukan oleh tiga faktor, yaitu 1) kemampuan mengatasi kendala

UNIVERSITAS TERBUKA

pengembangan produksi, 2) kapasitas dalam melakukan reorientasi dan implementasi arah dan tujuan pengembangan agribisnis padi, dan 3) keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi usaha tani di lahan sawah dengan mempertimbangkan komoditas alternatif nonpadi seperti palawija dan hortikultura. Kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah: 1) memfasilitasi pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan, perbaikan sistem insentif usaha tani, dan mendorong pengembangan agroindustri padat tenaga kerja di pedesaan, 2) reorientasi arah dan tujuan pengembangan agribisnis padi dengan sasaran peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan rumah tangga petani padi, serta sebagai wahana dinamisasi perekonomian desa, dan 3) pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan), teknologi, permodalan, kebijakan stabilisasi, dan penyuluhan untuk komoditas alternatif nonpadi yang bernilai ekonomi tinggi tetapi memiliki risiko yang besar.

Untuk penelitian Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terkait pada komoditas yang diteliti yakni sektor pertanian dan penelitian ini pada komoditas sector perkebunan kelapa.

5. Ahmad Aris, dkk pada Tahun 2010, dengan judul jurnal penelitian " Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat terhadap Kemiskinan dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir'. Penelitian ini bertujuan

UNIVERSITAS TERBUKA

untuk menganalisis dampak pengembangan sektor kelapa terhadap perekonomian wilayah, menganalisis indikasi dan potensi kebocoran wilayah sektor kelapa serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah, menganalisis opsi kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemisikinan.

Adapun penelitian Ahmad Aris, dkk diatas memiliki persamaannya pada objek dan lokasi penelitian sedangkan perbedaannya terletak pada analisis komoditas sektor perkebunan kelapa dalam hal menganalisis dampak pengembangan sektor kelapa terhadap perekonomian wilayah, indikasi dan potensi kebocoran wilayah sektor kelapa serta dampaknya terhadap perekonomian wilayah, dan opsi kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemisikinan sedangkan penelitian ini menganalisis tentang bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Puji Meilita Sugiana pada Tahun 2012, dengan judul penelitian " Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Jakarta Selatan. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelompok usaha bersama adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta sebagai pusat Negara dengan kompleksitas masalah melaksanakan

UNIVERSITAS TERBUKA

program ini pada tahun 2009. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses kementerian sosial dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. Pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota. Jakarta selatan dipilih sebagai *pilot project* program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan dan mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Dalam pelaksanaannya kemampuan manajerial serta pemasaran dalam bentuk kemasan menjadi kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar. Hambatan dari pelaksanaan program ini adalah pada

UNIVERSITAS TERBUKA

implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

Selanjutnya penelitian Puji Meilita Sugiana diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini terkait dengan metode penelitian yang digunakan yaitu analisa deskriftif dan konsep teori tentang implementasi kebijakan sedangkan perbedaan penelitian menyangkut subjek kebijakan. Penelitian diatas subyek penelitian adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) sedangkan pada penelitian ini adalah Kelompok sasaran pembuat program : Pegawai pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Anggota DPRD yang membidangi Perkebunan, penerima program meliputi masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan

Menurut Leslie A. Pal (dalam Widodo, 2010:10) mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu :

> Definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah.

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2009:2) mengatakan bahwa :

> Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*)".

UNIVERSITAS TERBUKA

Selanjutnya Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa :

> (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Widodo, 2010:14) yaitu :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda (agenda setting , yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan *(decision making)*, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, James Anderson (dalam Subarsono, 2009:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan ? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana menggembangkan pilihan-pilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi *(implementation)*: siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan ? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Selanjutnya kebijakan menurut Dye (dalam Indiahono, 2009:17) adalah :

> *Whatever government choose to do or not to do.* Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan.

Menurut pendapat Harold Koontz yang dikutip Hasibuan (1996:99) mendefinisikan pengertian kebijakan, yaitu:

> Kebijakan adalah pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan.

Selanjutnya Irfan (2009: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya

UNIVERSITAS TERBUKA

dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Irfan (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah

> *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Selanjutnya konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson (Winarno, 2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision)* yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2009:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

> Suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).

UNIVERSITAS TERBUKA

Kebijakan publik sebagaimana dikemukakan di atas tidak lahir begitu saja tanpa melalui tahapan proses tertentu. Anderson (Widodo, 2011:16) membedakan tahapan proses tersebut dalam lima langkah, yaitu:

> (a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adoption*, (d) *policy implementation*, (e) *policy assessment/evaluation.*'

Tahapan proses kebijakan tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan tahapan-tahapan analisis kebijakan. Hubungan tersebut diuraikan oleh Dunn (2003:25) sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan

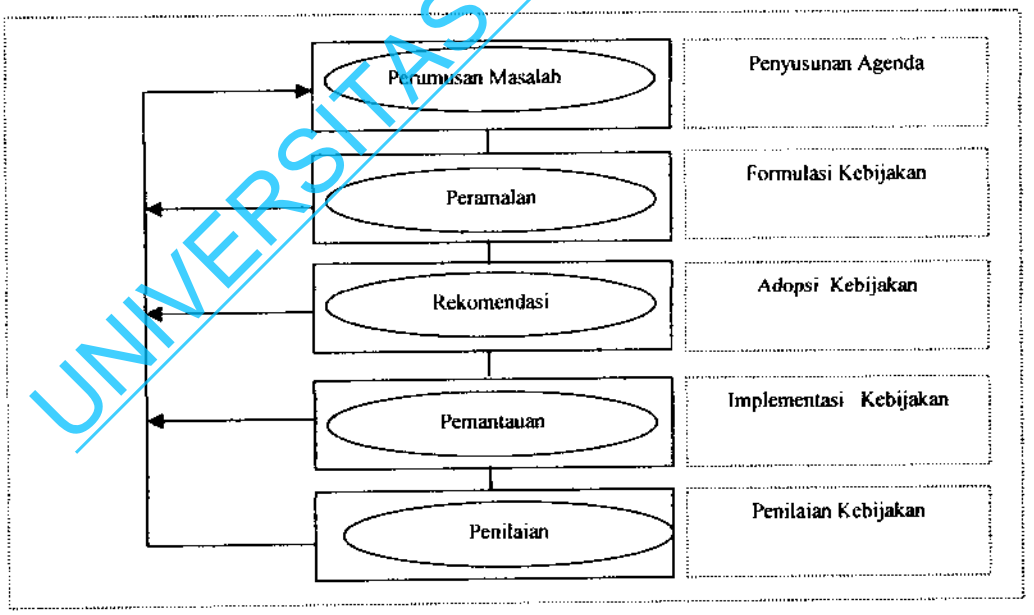

Sumber : Dunn, 2003: 25

Tahapan penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama perumusan masalah (*problem stucturing*).

UNIVERSITAS TERBUKA

Pada tahap formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut peramalan (*forecasting*) dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahapan berikutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui suatu proses rekomendasi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring/pemantauan dilakukan. Dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan. Dari proses kebijakan sebagaimana dijelaskan, meskipun telah melalui suatu proses tahapan yang rumit, namun tidak akan memiliki makna apapun bila tidak diimplementasikan. Suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan

UNIVERSITAS TERBUKA

tujuan tertentu. Dimana hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where,* dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Selanjutnya secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah :

> *To provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va (dalam Widodo, 2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan:

> *Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyy decision.*

Dan Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan :

> *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation.Those event and activities that occur after the isuing of outhorita tive public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event.*

Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

> Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa, 1994:15) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

> Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) mengatakan bahwa :

> Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (*target group*).

Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) :

> Memfokuskan diri pada sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut".

Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada :

> Tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program.

Sementara dari sudut pandang *target groups,* menurut Wahab (2005:64) :

> Implementasi akan lebih dipusatkan pada apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

UNIVERSITAS TERBUKA

Sehubungan dengan pendapat yang berhubungan dengan organisasi Pemerintah maupun swasta dapat dipahami bahwa implementasi memiliki makna penting. Implementasi bersifat sangat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Melalui proses implementasi dapat diketahui sejauh mana suatu kebijakan dapat mengadopsi aspirasi sekaligus menyentuh masyarakat untuk secara sukarela melakukannya sebagai perwujudan rasa tanggungjawabnya terhadap bangsa dan negara. Dengan kata lain, melalui implementasi akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan telah menjawab suatu persoalan atau justru sebaliknya.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006:138), yaitu:

> Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan

UNIVERSITAS TERBUKA

mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan.

Selanjutnya Robert Eyestone (Soenarko, 2005:42) menyatakan kebijakan pemerintah sebagai berikut :

> Kebijakan Pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan". Ini merupakan defenisi yang sangat luas, yang tentu saja baru memberikan kejelasan yang masih samar-samar dan orang masih perlu banyak mencari-cari pengertiannya.

Sedangkan Carl J. Friedrich memberikan pengertian kebijakan pemerintah (Soenarko, 2005:42) sebagai berikut :

> "Kebijakan Pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta tujuan tertentu".

Berdasarkan defenisi-defenisi diatas yang telah dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka akan ditemukan konsep inti kebijakan pemerintah, yaitu :

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang.
b. Sebuah reaksi kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijkan pemerintah berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang sedang berkembang di masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijkan pemerintah biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakn pemerintah berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Pendekatan-Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III (dalam Widodo, 2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

> Faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010 :97), komunikasi diartikan sebagai :

> Proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana *(implementors)* kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3. Dimensi konsistensi *(consistency)* diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Sumberdaya

Edward III (dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa :

> *Probably the most essential resources in implementing policy is staff". No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carry ing out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.*

b. Sumberdaya Anggaran
Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate acilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public.* terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. *New towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program.* Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah

c. Sumberdaya Peralatan
Edward III (dalam Widodo, 2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

d. Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu

UNIVERSITAS TERBUKA

lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:104) dikatakan sebagai:

> Kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana *(implementors)* tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus, 2006:159) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat -pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2005:149) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukanny.

Namun Edward III (dalam Widodo, 2010:106) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.. Struktur birokasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Edwards III (dalam Winarno, 2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

Standard Operational Procedure (SOP) dan *fragmentasi. Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, *system* dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian

UNIVERSITAS TERBUKA

tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III (dalam Winarno, 2005:152) menjelaskan bahwa:

> SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Edward III (dalam Widodo, 2010:106), mengatakan bahwa:

> Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2003:58) masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai

kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Berhubungan dengan konteks pencapian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006:19) menerangkan bahwa:

> Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Seiring dengan pendapat tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa :

> Kebijakan publik berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley (dalam Tachjan, 2006:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu:

Policy level, organizational level, operational level.

Dengan demikian dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat)* dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback)* bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikkan atau peningkatan kebijakan.

Adapun proses kebijakan publik adalah serangkian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel.

Menurut Jones (1984:27) mengemukakan sebelas aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu:

> *Perception/definition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination.*

Tachjan (2006:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Dengan demikian efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

> Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

> Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji (dalam Agustino, 2006:154) bahwa:

> *The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented".*

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu:

> Pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Lester Stewart, 2000:108) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*)".

Dengan demikian pendekatan *top down,* pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga

UNIVERSITAS TERBUKA

setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipastif.

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

> Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin (dalam Tachjan, 2006:27):

> *Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant"*. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Hal ini dikemukakan oleh Grindle (dalam Tachjan, 2006:31) suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek bahwa :

UNIVERSITAS TERBUKA

Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect".

Menurut Terry (dalam Tachjan, 2006:31) program merupakan;

A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki ,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Menurut Tachjan (2006:35) program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.

UNIVERSITAS TERBUKA

3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplentasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana keputusan itu dilaksanakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang *inheren* dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Sumaryadi,2005:85), kegagalan kebijakan (*policy failure)* dapat disebabkan antara lain:

a. Karena tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya *Non implementation.*
b. Karena tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam proses pelaksanaan *unsuccessful implementation.*

Hogwood dan Gunn (dalam Sumaryadi,2005:85) memberikan pengertian bahwa n*on implementation* mengandung arti bahwa:

> Suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama,atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga, betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebiajakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005;88).

1. Model George C. Edwards III

   Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) struktur birokrasi.

Gambar 2.2
Hubungan variable yang mempengaruhi implementasi

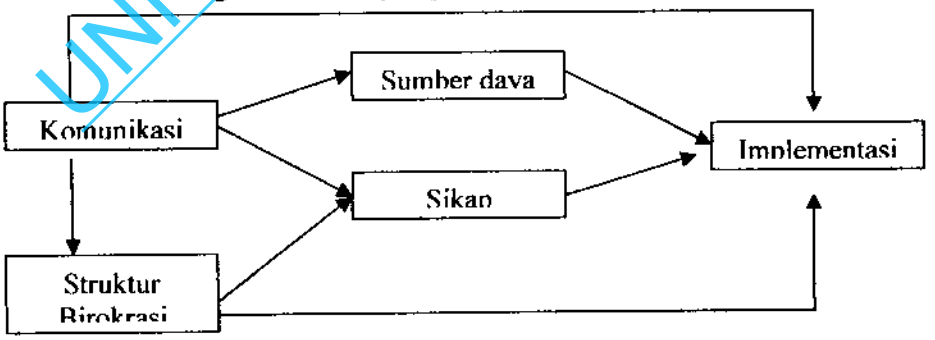

Sumber : Subarsono, 2005: 91.

UNIVERSITAS TERBUKA

Keterangan :

a. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya. Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalah pahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

b. Sumberdaya

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi atau sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kespakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2005:205) berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi 6 (enam) karakteristik birokrasi, yakni :

1) Sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik;
2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap;
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda;
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks.
5) Birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tak perlu dipertanyakan lagi;
6) Birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuasaan-kekuasaan yang berasal di luar dirinya. Otonomi yang mereka miliki membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar-menawar guna meraih pembagian yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil. Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi seperti di atas, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan.

2. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dalam Agustino (2006:167) dikenal *dengan Implementasi as A Political and Administrative Process.* Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, yang mana pengukuran keberhasilannya dapat dilihat dari dua hal :

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design)dengan merujuk pada aksi kebijakannya
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang mana dimensi ini diukur dengan dua faktor, yaitu :
   1) Imfak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
   2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Gambar 2.3
Model implementasi kebijakan Grindle

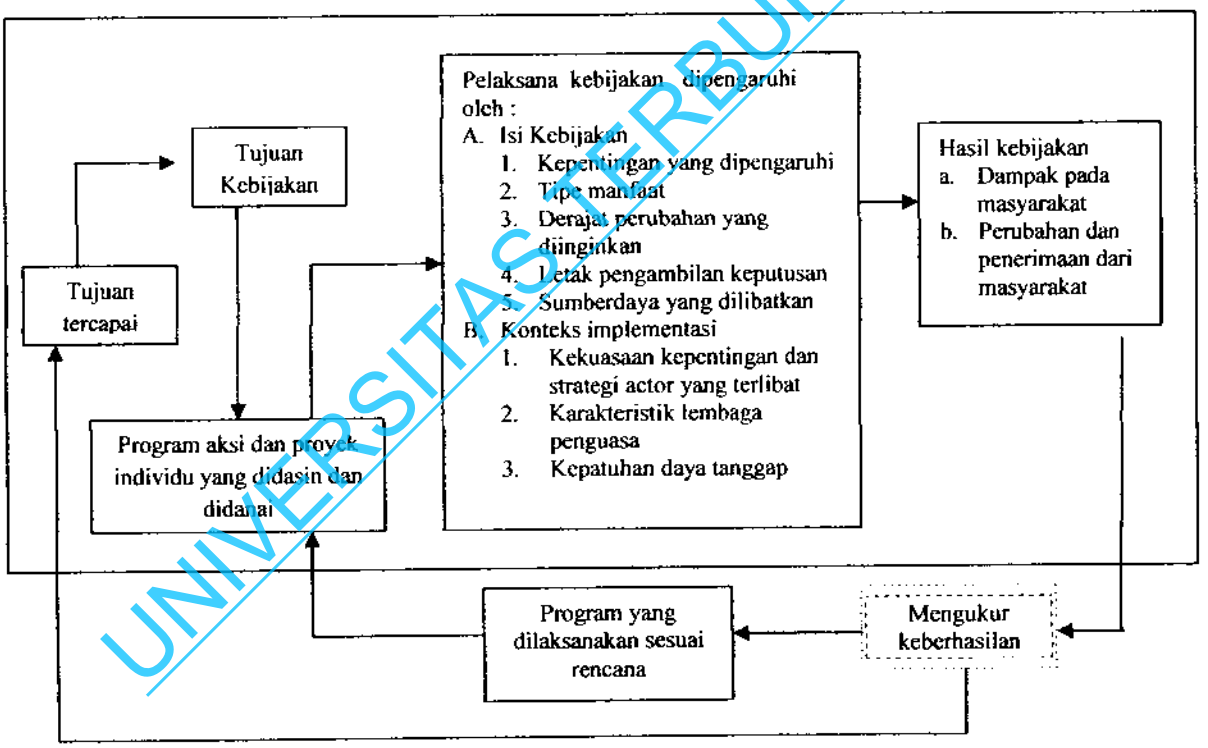

Sumber : Agustino (2006:167)

3. Model Implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975) (dalam Subarsono, 2005:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

(1) standar dan sasaran kebijakan;
(2) sumber daya;

UNIVERSITAS TERBUKA

(3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
(4) karakteristik agen pelaksana;
(5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Gambar 2.4
Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

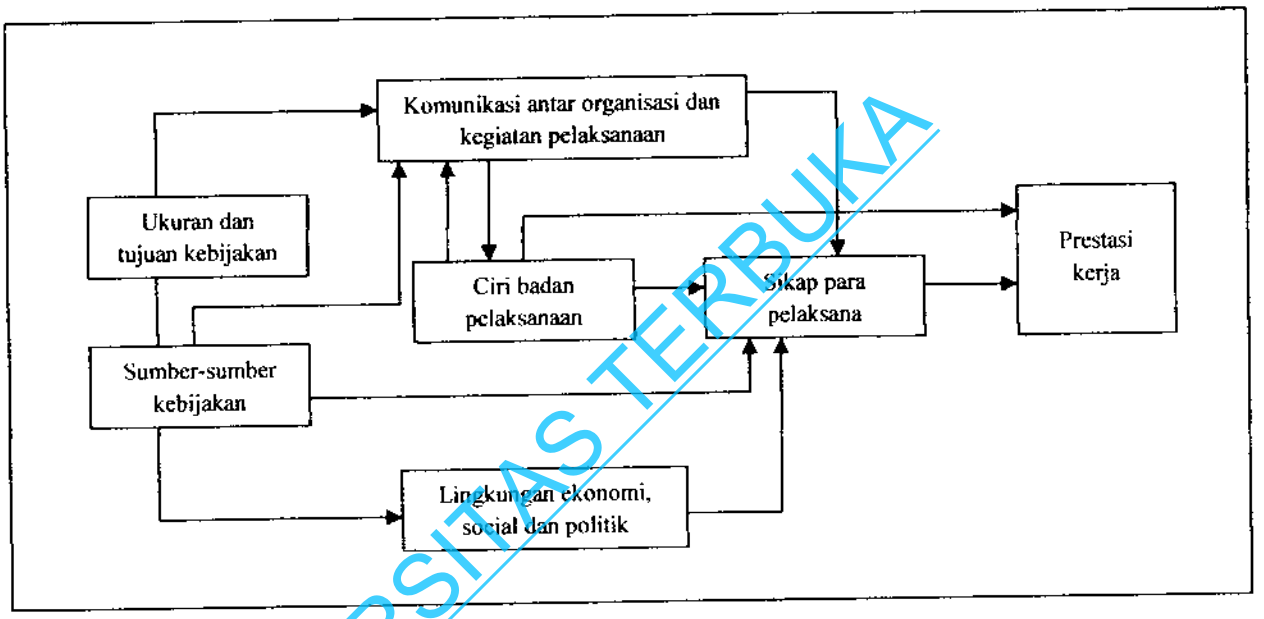

Sumber : Subarsono, 2005 : 100

UNIVERSITAS TERBUKA

4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) (dalam Subarsono 2005:94), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems)*;
b. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation);*
c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations).*

Karakteristik masalah:

(1) Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Ukuran dan tujuan kebijakan Sumber-sumber kebijakan Ciri badan pelaksanaan Sikap para pelaksana Prestasi kerja Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

(2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.

(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan:

(1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidak jelasan isi

UNIVERSITAS TERBUKA

kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

(2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

(3) Alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.

(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

(6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan:

(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup

UNIVERSITAS TERBUKA

dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

(2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.

(3) Sikap kelompok pemilih *(constituency groups)*. Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

(4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 2.5
Model Implementasi Kebijakan Mazamanian dan Sebatier

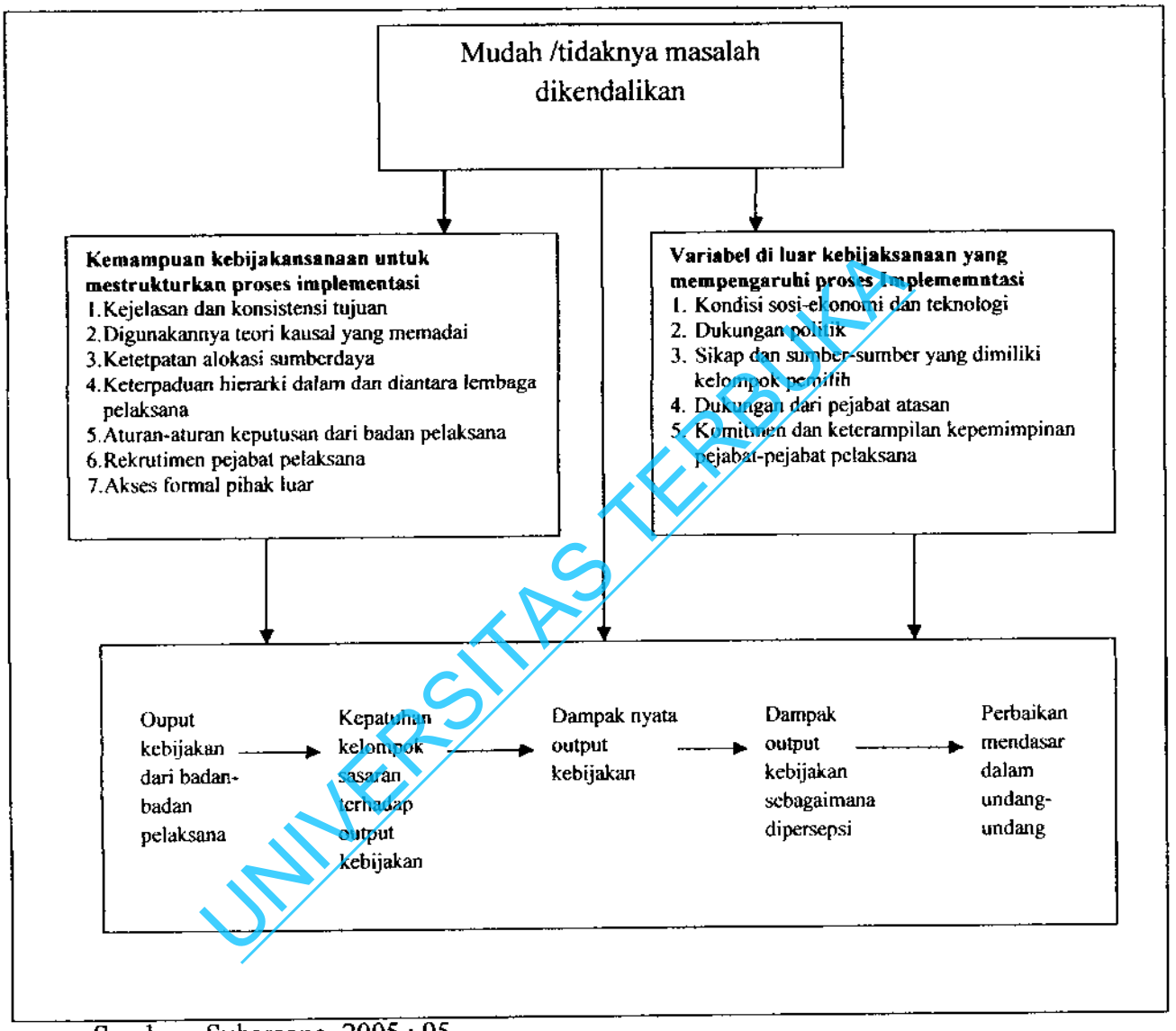

Sumber : Subarsono, 2005 : 95.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Geoge Edwards III, dimana Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) Komunikasi, (2) sumberdaya, (3) Disposisi, (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubung satu dengan yang lain, sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Publik

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

tentang peningkatan pendapatan petani lokal di Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi komunikasi, sumberdaya, sikap dan faktor lain yang berpengaruh.

F. Perkebunan Kelapa

Pembangunan subsektor perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Maka tujuan pembangunan subsektor perkebunan harus sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Arah pembangunan perkebunan yang di tujukan untuk meningkatkan nilai ekspor sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang diinginkan. Tujuan dari upaya ini adalah dapat menyediakan berbagai alternatif yang sahih bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang berdomisili di wilayah tertentu. Penentuan prioritas pembangunan akan mengarah kepada kebijakan pembangunan dengan tepat dan terarah, sehingga kemubaziran dan kegagalan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan dapat dihindarkan.

Pengembangan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian harus dijalankan berdasarkan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini juga membutuhkan keseimbangan teknologi di setiap subsistem agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan yang dapat ditimbulkan pada sistem secara menyeluruh. (Sastra Atmadja, 1985).

Selanjutnya menurut Sastra Atmadja (1985) dikatakan bahwa berkembangnya pengetahuan dan teknologi serta semakin bertambahnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya, pengembangan pertanian juga menentukan kemajuan suatu negara tidak terkecuali Indonesia. Artinya pengembangan pertanian ini mempunyai prospek jangka panjang yang baik tetapi juga perlu diperhatikan faktor-faktor yang sangat menentukan yaitu kesesuaian dan keserasian dalam mengelola sistem tersbut di samping perlunya kehendak politik dan tindakan politik dari pemerintah yang betul-betul sejiwa dengan perkembangan pertanian di negeri ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Menurut Adiyoga (1999) pengembangan subsektor perkebunan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta mengisi dan memperluas pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui peningkatan dan penganekaragaman hasil dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Hal inilah yang mendasari peletakan sub sektor perkebunan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan merupakan salah satu strategi dasar untuk memacu produksi pertanian dalam rangka memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Selanjutnya Supadi dan Nurmanaf (2006) menjelaskan bahwa kelapa merupakan tanaman perkebunan dengan areal terluas di Indonesia, lebih luas dibanding karet dan kelapa sawit, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budi daya setelah padi. Kelapa menempati areal seluas 3,70 juta ha atau 26% dari 14,20 juta ha total areal perkebunan. Sekitar 96,60% pertanaman kelapa dikelola oleh petani dengan rata-rata pemilikan 1 ha/KK (Allorerung dan Mahmud 2003), dan sebagian besar diusahakan secara monokultur (97%), kebun campuran atau sebagai tanaman pekarangan.

Pada dasarnya seluruh bagian buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk untuk berbagai keperluan. Teknologi pengolahan, standar mutu dan sistem sertifikasinya juga sudah dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia. Namun berbagai kelemahan masih melekat di Industri pengolahan kelapa kita seperti suplai bahan baku, karena industri tidak memiliki kebun kelapa dan investasi yang relatif besar sehingga kurang menarik investor (FOKPI, 2006).

Allorerung dan Lay (1998) menyatakan bahwa kelapa sebagian besar diolah menjadi kopra yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng. Namun usaha ini semakin lemah baik dalam perdagangan domestik maupun luar negeri karena tersaingi oleh minyak kelapa sawit. Selain diolah menjadi minyak, kini telah berkembang diversifikasi produk kelapa seperti dessicated coconut, gula kelapa, nata de coco, berbagai produk daging kelapa, kelapa parut kering, arang tempurung, serat sabut kelapa, mebel kayu kelapa dan akhir-akhir ini berkembang santan siap saji dengan berbagai kemasan.

Dengan demikian maka kegiatan industri kelapa terpadu akan memberi dua keuntungan sekaligus yakni pertama menguntungkan dari segi agrobisnis dan yang kedua turut menjaga kelestarian alam. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai luas areal terbesar di kabupaten Indragiri Hilir yang sampai saat ini belum banyak disentuh para investor, sedangkan potensi yang ada seperti telah diuraikan diatas bila didayagunakan akan memberi keuntungan dari segi bisnis. Disamping itu, bagi pemerintah daerah dan masyarakat akan merupakan sumber penghasilan tambahan bagi petani kelapa.

UNIVERSITAS TERBUKA

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

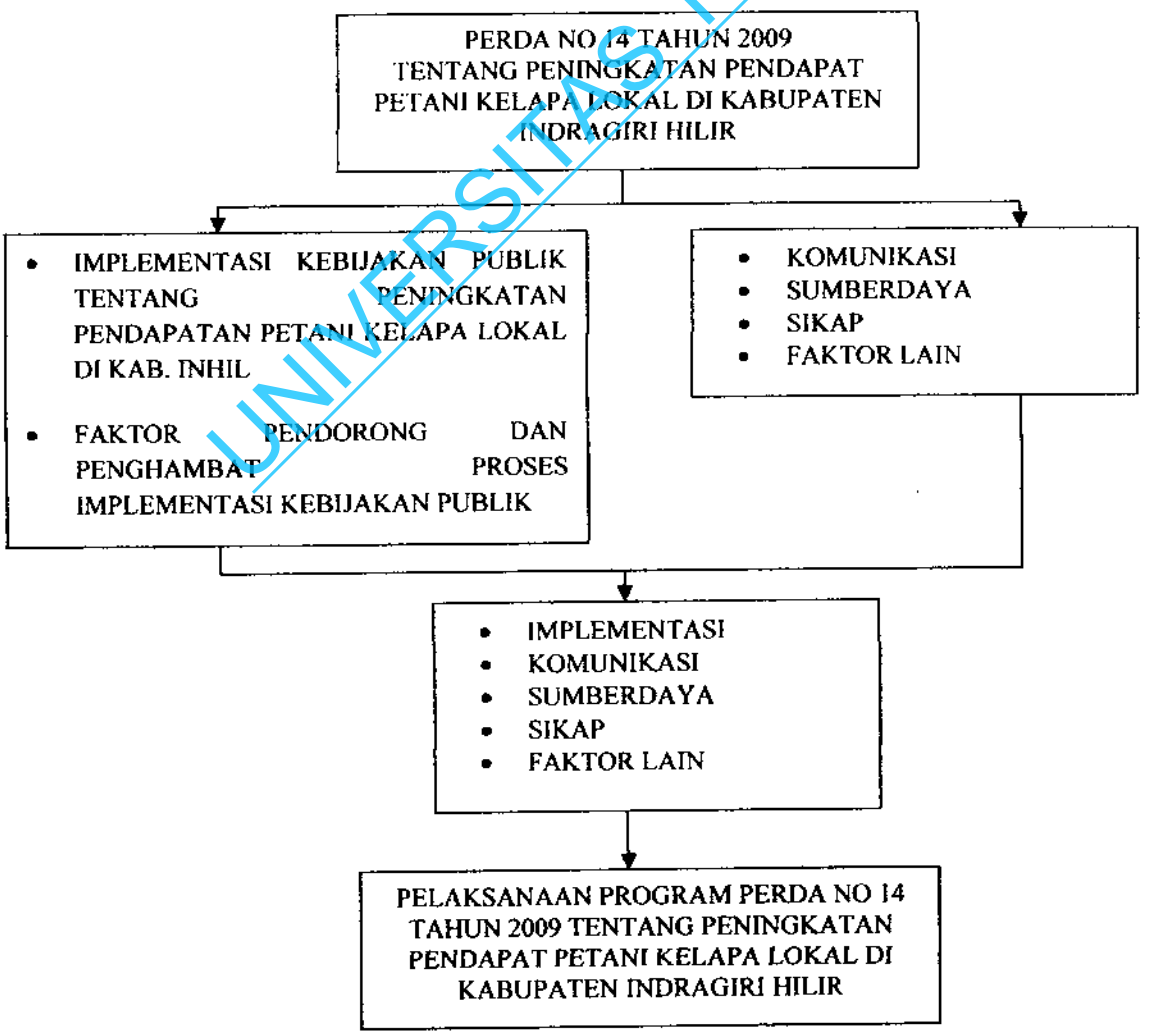

UNIVERSITAS TERBUKA

H. Fokus Penelitian

Sebagaimana dengan kerangka pemikiran penelitian maka dapat dideskripsikan dan di analisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan

   Implementasi kebijakan yaitu kesesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang dicapai. Adapun indikator implementasi kebijakan diantaranya :

   a. Target yang diinginkan oleh Pemerintah (terutama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir) dan realisasi mengenai program peningkatan kesejahteraan petani setelah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009.

   b. Pemahaman masyarakat tentang program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan terhadap isi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009.

   c. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian/perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir, yang dapat dilakukan melalui variabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

a. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Adapun aspek dalam komunikasi adalah :

1) Kejelasan informasi seputar pelaksaan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama petani kelapa lokal.
2) Kecukupan informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada petani.
3) Ketepatan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dalam meningkatkan pendapatan petani.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementasi kekurangan sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Adapun aspek-aspek dalam sumber daya adalah :

1) Kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan mensejahterakan petani.
2) Kemampuan petugas dalam komunikasi dengan masyarakat mengenai Peraturan Derah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 tentang kesejahteraan petani.

UNIVERSITAS TERBUKA

3) Jumlah personel yang diturunkan dalam implementasi Peraturan Derah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 tentang kesejahteraan petani.

c. Sikap

Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementot memiliki sikap / perspektif yang berbedadengan pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, adapun aspek yang menjadi fokus dalam sikap meliputi :

1) Persepsi petani kelapadi Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Peraturan Derah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani.

2) Sikap petani kelapadi Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Peraturan Derah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani.

d. Faktor Lain

1) Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program peningkatan kesejahteraan petani selain komunikasi, sumber daya dan sikap.

2) Faktor penghambat dalam implementasi program peningkatan kesejahteraan petani.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nazir (2005:84) adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Sarwono (2006:79), desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Andi (2001:1995) subjek penelitian atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan Menurut Sugiyono (2009:38) objek penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013 khususnya Peningkatan Pendapatan Petani Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk kebutuhan penelitian ini maka subjek dan informan penelitian diambil secara *purposive*, obyek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti (*key informan*). Informasi selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjukan orang lain yang dapat membuka informasi, dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjukan orang lain yang dapat memberikan informasi begitu seterusnya. Cara ini biasanya lazim disebut sebagai *snow ball* yang dilakukan secara serial atau berurutan. Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama adalah : Kelompok sasaran pembuat program : Pegawai pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Anggota DPRD yang membidangi Perkebunan, penerima program meliputi masyarakat serta beberapa tokoh masyarakat.

Dengan memperhatikan karakter informan maka dalam penelitian ini jumlah informan yang dibutuhkan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu. Proses penelitian berlangsung dari satu informan ke informan yang lain, penyebaran satu informan ke informan yang lain berlangsung secara *snow balling* (bola

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

salju), yaitu bermula dari seorang informan yang mungkin pengetahuan atau keterlibatan didalam permasalahan yang diteliti relative sedikit beralih kepada informan yang keterlibatannya lebih besar (Hidayat, 2002:5).

C. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Hal ini perlu diuraikan lebih detil dilakukan dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan melakukan sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*field research*). Studi Lapangan dilakukan dengan cara:

   a. Observasi Lapangan Langsung

      Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013 khususnya Peningkatan Pendapatan Petani Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir.

UNIVERSITAS TERBUKA

b. Wawancara *(interview)*

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam *(in-depth interview)* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *(guide)* wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo, 2006:72). Dalam wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung baik secara formal maupun non formal dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas.

c. Dokumentasi (*documentation*)

Menurut Sugiyono (2009;41) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

E. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Sebagaimana dikemukakan Singarimbun (1991:4), analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, peneliti mengembangkan konsep, dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dalam hubungannya dengan penelitian ini analisis deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Mengelompokkan data dari informasi yang diperoleh yang merupakan gambaran terhadap variabel yang teridentifikasi sebagaimana dikemukakan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Penyajian hasil analisis data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun data sekunder dan menghubungkan dengan variabel penelitian
3. Menarik kesimpulan terhadap rangkaian analisis data dan informasi yang telah disajikan sehingga dapat diketahui bagaimana target yang diinginkan oleh Pemerintah dan realisasi mengenai program peningkatan kesejahteraan petani setelah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009, pemahaman masyarakat tentang program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan terhadap isi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14 Tahun 2009 dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian/perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan **"NEGERI SERIBU JEMBATAN"** dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada :

0 36' Lintang Utara

1 07' Lintang Selatan

104 10' Bujur Timur

102 30' Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Propinsi Jambi

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di penggunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan

UNIVERSITAS TERBUKA

kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas tanah Organosol (Histosil), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Tanah ini dominan di Wilayah Indragiri Hilir terutama daratan rendah diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjang aliran sungai umumnya terdapat formasi tanggul alam natural river leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial (Entisol) dan Gleihumus (Inceptisol). Vegetasi alami dari daerah tanah-tanah organosol, alluvial dan gleihumus adalah hutan pematang, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan pasang surat, penggunaan lahan untuk hutan lebat, belukar dan sejenisnya pada tahun 1994 seluas 841.242 hektar. Luas areal perkebunan meningkat dari 379.760 hektar menjadi 464.802 hektar atau meningkat 8,50% dibandingkan dengan periode sebelumnya sedangkan total produksi hasil perkebunan juga mengalami peningkatan dari 283.266 ton menjadi 416.690 ton naik sebesar 133.424 ton atau 13,34%.

Topograpi daerah Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober sampai maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama 3 (tiga) bulan lamanya. Sehingga menimbulkan kesulitan air bersih, pengairan dan sebagainya. Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar petani kelapa lokal kehulu sungai,

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan bagi tanam-tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan tingkat keasinan tinggi.

Secara geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi Investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang anadara dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat. Kabupten Indragiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor perekonomian, terutama di bidang Perkebunan, Perikanan/kelautan dan Perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Di sektor perkebunan beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit dan sagu.

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Kondisi Perkebunan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil plot, didapati bahwa rata-rata tanaman yang tumbuh dalam satu hektar adalah 25 – 75 batang tanaman. Populasi perhektar tanaman ini sangat jauh dari angka seharusnya. Secara normal dengan system jarak tanam 4 x 4,5 depa atau 6,67 x 7,5 meter maka batang per hektarnya adalah 140 – 144 pohon. Di Kabupaten Indragiri Hilir tanaman kelapa pada umumnya sudah berumur lebih dari 50 tahun. Kebanyakan sudah tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

produktif, sedangkan penanaman baru melalui peremajaan tidak merata pada semua lahan, hanya sebagian kecil saja. Luasnya kondisi perkebunan kelapa yang mengalami kerusakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Kondisi Perkebunan Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kecamatan	Luas area (ha)				Jumlah
		Potensial	Tanaman Belum menghasilkan	Tanaman menghasilkan	Tanaman Tua dan Rusak	
1	Keritang	-	1,695	24,067	1,957	27,719
2	Kemuning	-	8	8	1	17
3	Reteh	-	2,607	16,512	6,239	25,358
4	Sungai Batang	-	464	8,486	5,441	14,391
5	Enok	-	3,102	32,102	8,904	44,108
6	Tanah Merah	-	285	12,252	8,421	20,958
7	Kuala Indragiri	34,032	2,195	12,668	10,847	25,710
8	Concong	18,209	2,745	6,895	6,989	16,629
9	Tembilahan	-	207	7,202	1,699	9,108
10	Tembilahan Hulu	-	102	3,106	421	3,629
11	Tempuling	-	1,344	6,101	2,718	10,163
12	Kempas	-	1,126	4,364	610	6,100
13	Batang Tuaka	-	3,448	14,493	3,483	21,424
14	Gaung Anak Serka	-	2,358	10,889	2,165	15,412
15	Mandah	-	4,484	37,554	13,178	55,216
16	Kateman	-	6,199	24,088	7,643	37,930
17	Pelangiran	-	4,761	9,689	1,274	15,724
18	Teluk Belengkong	-	61	3,366	72	3,499
19	Pulau Burung	-	1,225	8,105	1,545	10,875
20	Gaung	-	6,912	17,795	3,884	28,591
Total		**52,241**	**45,328**	**259,742**	**87,491**	**392,561**

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013

UNIVERSITAS TERBUKA

2. Program kerja Peningkatan Pendapatan Kelapa lokal di Kabupten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangkan menengah daerah, dibuatlah beberapa program guna meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Program Kerja Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

No	Tahun	Program	Indikator Kinerja
1	2009	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya wawasan petani dan pelaku agribisnis
		b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	a. Terlaksananya rehabilitasi kelapa rakyat b. Terlaksananya pengembangan tanaman sela perkebunan
		c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Terbukanya peluang kerjasama regional dan nasional penyediaan hasil produksi Perkebunan
		d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya penyediaan sarana produksi perkebunan
		e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya penyediaan sarana produksi perkebunan b. Terlaksananya pengembangan bibit unggul perkebunan
2	2010	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	a. SDM Petani Sub Sektor Perkebunan Meningkat b. Meningkatnya kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dan jenis Bantuan Permodalan lainnya dari pemerintah
		b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	a. Meningkatnya kemampuan petani dalam penanganan pasca panen hasil perkebunan b. Terlaksananya Diversifikasi Tanaman Perkebunan d. Meningkatnya luas tanaman komoditas perkebunan e. Kegiatan dapat dimonitoring dan di evaluasi
		c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya Promosi atas hasil produksi Perkebunan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Tahun	Program	Indikator Kinerja
		d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya transfer teknologi budidaya tanaman perkebunan kepada tani b. Meningkatnya Prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa tanggul mekanik dan saluran c. Berfungsi prasarana kebun kelapa rakyat d. Kegiatan dapat termonitoring dan di evaluasi dengan baik
		e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya penyediaan sarana produksi perkebunan b. Tersedianya penyediaan bibit unggul perkebunan c. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana peraturan perundang-undangan perkebunan
3	**2011**	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	a. SDM Petani Sub Sektor Perkebunan Meningkat b. Meningkatnya kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan melalui Bank dan Program Bantuan Permodalan dari Pemerintah
		b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	a. Meningkatnya Kemampuan Petani dalam penanganan pasca panen hasil perkebunan Terlaksananya Diversifikasi b. Tanaman Perkebunan

UNIVERSITAS TERBUKA

No	Tahun	Program	Indikator Kinerja
			c. Terlaksananya penngkatan d. mutu dan keamanan pangan Terlaksananya Pengendalian e. Hama Terpadu - Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelapa Dalam - Terlaksananya Pemeliharaan Peremajaan Kebun - Kegiatan dapat dimonitoring dan di evaluasi
		c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya Promosi atas hasil produksi perkebunan
		d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya transfer teknologi perkebunan b. Meningkatnya Prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa Tanggul Mekanik dan saluran c. Meningkatnya Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna d. Kegiatan dapat termonitoring dan dievaluasi dengan baik
		e. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	a. Tersedianya Prasarana Produksi Perkebunan b. Tersedianya penyediaan bibit unggul perkebunan c. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksana Regulasi mengenai Usaha Perkebunan
4	**2012**	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	a. SDM Petani Sub Sektor Perkebunan Meningkat b. Meningkatnya kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan melalui Bank dan Program Bantuan Permodalan dari Pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Tahun	Program	Indikator Kinerja
		b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	a. Meningkatnya Kemampuan Petani dalam penanganan pasca panen hasil perkebunan b. Terlaksananya Diversifikasi Tanaman Perkebunan c. Terlaksananya Peningkatan mutu dan keamanan Pangan d. Terlaksananya Pengendalian Hama terpadu e. - Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelapa Dalam - Terlaksananya Pemeliharaan Peremajaan Kebun f. Kegiatan dapat dimonitoring dan dievaluasi
		c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya Promosi atas hasil produksi perkebunan
		d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	a. Terlaksananya transfer teknologi perkebunan b. Meningkatnya Prasarana teknologi perkebunan tepat guna berupa Tanggul Mekanik dan saluran c. Meningkatnya Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna d. Kegiatan dapat termonitoring dan dievaluasi dengan baik
		e. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	a. Tersedianya Prasarana Produksi Perkebunan b. Tersedianya penyediaan bibit unggul perkebunan c. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksana Regulasi mengenai Usaha Perkebunan

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2013.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pihak-pihak yang terkait antara lain Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, Anggota DPRD, dan Petani Kelapa Lokal, maka diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Realisasi Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani belum cukup berhasil secara signifikan, karena beberapa indikator belum tercapai dilihat dari :

   a. Pengetahuan dan keterampilan petani

      Pengetahuan dan keterampilan petani kelapa lokal secara umumnya belum mumpuni karena masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan / pemeliharaan sarana, prasarana dan infra struktur kebun, sementara laju kerusakan kebun justru semakin besar per tahunnya. Petani Kelapa local di Kabupaten Indragiri Hilir banyak yang hanya melanjutkan usaha perkebunan kelapa lokal dari orang tua tanpa dibekali pengetahuan yang mumpuni dalam mengelola perkebunan kelapa lokal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada petani lokal Bapak M. Nopriyanto di Desa Mumpa, yaitu sebagai berikut :

> *"Ulun Kadak suah umpat pelatihan buk ai,.....yang ulun tahu naruskan usaha nan tuhak darai pang. (Saya tidak pernah mengikuti pelatihan bu, yang saya tahu hanya meneruskan usaha orang tua saja)....."*

Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada petugas penyuluh yaitu Bapak Saekun yang menuturkan sebagai berikut :

> *" Kegiatan penyuluhan dan pelatihan merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar teknologi budidaya yang ada dapat ditingkatkan serta melakukan diversifikasi produk kelapa yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar seperti gula merah, minyak kelapa murni, santan kara, dan aneka makanan berbahan kelapa ..... ".*

Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Herwanisitas (anggota Komisi B), yaitu sebagai berikut :

> *"Pengetahuan dan pemahaman petani kelapa lokal mengenai penerapan standardisasi mutu masih rendah. Akibat dari itu, nilai penerimaan pasar dan daya saing terhadap produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir juga masih rendah....."*

Belum tercapainya peningkatan kesejahteraan petani dilihat dari jumlah petani dan pelaku agribisnis yang mengikuti pelatihan dari Tahun 2009 – 2012 berjumlah 310 orang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan Tahun 2009 - 2012

No	Tahun	Jumlah Petani
1	2009	40
2	2010	150
3	2011	60
4	2012	60
Jumlah		**310**

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelaksanaan sosialisasi dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir tidak tercapai sesuai sasaran. Hal ini disebabkan jumlah peserta sosialisasi sangat kurang dan tidak dapat menyerap jumlah petani yang tersebar pada seluruh Kecamatan yang ada.

Jumlah peserta sosialisasi yang pernah diikuti oleh petani selama 4 (empat) tahun terakhir berjumlah 310 petani sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah petani kelapa lokal yang berjumlah 80.116 orang atau dengan kata lain hanya 0,39% petani yang sudah mengikuti sosialisasi. Idealnya pelatihan tersebut diselenggarakan di tiap kecamatan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar pendidikan dan pelatihan tersebut benar-benar tepat sasaran, bukan hanya sekedar program kerja.

Dengan sosialisasi tugas Pemerintah daerah yang bertujuan untuk menghimpun berbagai lembaga dan pihak yang peduli terhadap komoditas kelapa, dalam menggagas strategi pengembangan tanaman kelapa dapat terlaksana. Hal ini juga mendorong bahwa pengembangan sektor kelapa di daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup luas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena memiliki lahan kritis dan rusak serta mengingat lebih dari 90 persen petani kelapa yang ada merupakan petani yang miskin karena rendahnya produktivitas dengan daya beli kelapa yang rendah.

UNIVERSITAS TERBUKA

b. Kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan

Kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan melalui Bank dan Program Bantuan Permodalan dari Pemerintah belum berjalan optimal, hal ini sesuai dengan wawancara dengan petugas penyuluh lapangan yaitu Bapak Tugiyo sebagai berikut :

> *"Sebenarnya kita sudah salurkan bantuan kepada para petani kelapa lokal, namun pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menangani permodalan petani secara keseluruhan. Bantuan yang kita salurkan hanyalah bersifat ransangan bagi petani agar lebih proaktif dalam mencari modal....."*

Selain hal itu, pak Ngadiyo selaku kasi perencanaan Dinas perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menuturkan sebagai berikut :

> *"Kita juga sudah pernah menghimbau pihak swasta untuk membantu permodalan petani kelapa local, namun karena keterbatasan anggaran dari perusahaan maka persentase program bantuan kecil....."*

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herwanisitas Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, yang menyatakan bahwa :

> *"Dana yang kita anggarkan untuk membantu Petani tidaklah mencukupi untuk seluruh petani kelapa lokal, dimana yang kita bantu hanya bersifat Pilot Project saja..... "*

Selain itu, wawancara dengan petani kelapa lokal yaitu Bapak Luffy yang mengungkapkan sebagai berikut :

> *"Jalas ai kami ni kekurangan modal, buk. Kayak apa Bank handak caya, hidup sehari-hari aja ngaleh. (jelas lah sudah bu, kami kekurangan modal. Bagaimana pihak bank mau percaya, kebutuhan sehari-hari aja sulit)....."*

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan tidak berjalan optimal. Hal ini dikarenakan modal yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diberikan kepada petani sangat kecil dan tidak semua petani kelapa mendapatkan bantuan permodalan ini, dengan kata lain bantuan yang diberikan kepada petani melalui Program Bantuan Permodalan dari Pemerintah tidak berjalan optimal.

Mendorong penanaman modal swasta yang berkelanjutan pada sektor perkebunan merupakan hal penting guna meningkatkan pertumbuhan sektor perkebunan, memaksimalkan manfaat pembangunan dari sektor perkebunan yang kuat. Namun tidak dipungkiri bahwa bantuan modal dari pemerintah yang diberikan kepada petani kelapa dinilai kurang efektif. Bantuan yang diberikan malah memunculkan 'budaya gali lobang tutup lobang', yang justru menjadi beban ekonomi yang cukup berat bagi petani kelapa.

Bantuan permodalan yang diberikan kepada petani kelapa juga menjadi kendala utama bagi petani dalam mengembangkan usaha. Petani kelapa dianggap sebagai bagian masyarakat yang kurang layak mendapat dukungan permodalan, terutama dari perbankan. Penyebabnya tak lain karena rendahnya produktivitas dan nilai jual yang tidak dapat diprediksi dan sejauh ini akses petani kelapa kepada lembaga keuangan itu terbatas. Terlebih para petani yang memiliki keterbatasan lahan yang tidak luas. Oleh karenanya perlunya Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan yang aplikatif dan produktif, yakni dalam bentuk stimulasi program yang secara langsung bisa dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produksinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

c. Diversifikasi Tanaman Perkebunan Kelapa

Diversifikasi tanaman perkebunan kelapa secara vertikal belum maksimal dilaksanakan, Hal ini sesuai dengan Wawancara dengan Petugas Dinas Perkebunan yaitu Bapak Suparjo :

"Produk utama petani kelapa lokal kebanyakan kopra dan kelapa bulat, dimana kedua jenis produk ini harganya masih sangat rendah. Seharusnya petani mengembang produk gula kelapa karena permintaanya cukup banyak baik untuk pasar lokal, antar wilayah dan ekspor....."

Terlaksananya diversifikasi tanaman perkebunan kelapa secara horizontal berupa pengembangan tanaman sela juga belum maksimal, hal ini karena banyak tanaman sela yang terendam oleh air pasang. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan petugas penyuluh lapangan yaitu :

" Para petani sudah menanam tanaman sela yaitu nenas, namun karena air pasang yang dalam sehingga tanaman nenas tersebut tenggelam dan menjadi rusak, jadi petani enggan melakukan tanaman sela lagi....."

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari diversifikasi tanaman perkebunan kelapa secara vertikal belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan salah satu produk utama petani kelapa lokal yakni kopra dan kelapa bulat harganya masih sangat rendah.

Selanjutnya diversifikasi usahatani secara vertikal berarti menganekaragamkan produk usahatani disertai dengan peningkatan mutu dan menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah dan lebih kompetitif. Peluang untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa melalui pelaksanaan diversifikasi vertikal pada dasarnya sangat terbuka mengingat tersedianya luas areal dan produksi kelapa sebagai bahan baku

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

industry yang cukup mendukung, banyaknya industry dalam negeri yang masih memerlukan bahan baku, dan teknologi pengolahan yang tersedia. Dengan demikian tanaman kelapa sebagai sumber bahan baku mempunyai banyak peluang untuk melakukan diversifikasi produk olahannya.

Untuk itu perlunya peningkatan pendapatan petani melalui penerapan diversifikasi usahatani kelapa, secara vertical dengan memproduksi gula merah sebagai produk olahan dalam kegiatan usahatani lebih disarankan dibandingkan dengan produk olahan kopra karena dinilai lebih menguntungkan. Oleh karenanya perlunya peluang pasar dari produk yang dihasilkan dan kemampuan modal investasi dalam pengembangan usahatani produk gula merah sebagai salah satu alternative bagi peningkatan pendapatan petani kelapa di daerah Indragiri Hilir.

d. Rehabilitasi kelapa rakyat. Peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah kebun (ha) yang diremajakan oleh
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tahun	Jumlah Kebun yang diremajakan (ha)	
		Rencana	Realisasi
1	2011	135	135
2	2012	135	135
Total		270	270

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2013

Dari luas tanaman kelapa lokal yang rusak di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 87,491 Ha sehingga secara prosentase hanya 0,3 % (persen) yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

dilaksanakan Pemerintah, sedangkan 99,07 persen lagi belum teremajakan. Seharusnya peremajaan ini dilakukan oleh Petani. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Anggota DPRD yaitu Bapak H. Bakri , sebagai berikut :

> *"Bagaimana Petani-petani kelapa lokal tersebut mau melakukan peremajaan kelapa sementara harga kelapa yang diterima petani sangat rendah hanya berkisar Rp. 300-500 per butir sedangkan kopra seharga Rp. 1.000 per kg, sehingga menyebabkan kurang nya motivasi petani dalam mengelola kebun kelapa mereka tersebut secara optimal. Apalagi mau meremajakan kebun kelapa....."*

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan Pegawai Dinas Perkebunan yaitu Bapak Surya sebagai berikut :

> *"Terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan, dibatasi oleh ketersediaan dana dan sumber daya yang ada....."*

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dan dilihat dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi kebun kelapa yang dilakukan petani tidak maksimal. Hal ini karena berpengaruh terhadap harga kelapa yang rendah dan tingginya kerusakan lahan perkebunan yang disebabkan infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah.

Perlunyan peremajaan kebun kelapa dilakukan karena komoditas kelapa dimanfaatkan bukan produk primernya saja, baik dalam bentuk kelapa segar maupun kopra untuk bahan baku minyak goreng. Hal tersebut dilakukan agar pengembangan produk dan pemanfaatan hasil samping

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan limbah akan meningkatkan nilai tambah produk kelapa yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan petani kelapa. Demikian pula lahan dibawah pohon kelapa masih dapat dimanfaatkan dengan kegiatan diversifikasi baik dengan tanaman pangan, hortikultura atau tanaman perkebunan lainnya maupun ternak, sedangkan untuk tanaman yang sudah tidak produktif lagi perlu diremajakan dengan menggunakan benih varietas unggul. Sedangkan untuk perluasan tanaman dilaksanakan pada daerah-daerah yang masih tersedia lahan serta mempunyai potensi untuk pengembangan kelapa.

Berdasarkan kondisi yang ada dan mengingat bahwa pada sentra sentra produk kelapa, peran ekonomi tanaman kelapa cukup dominan, maka dipandang perlu adanya upaya pengembangan yang dapat dijadikan acuan untuk peremajaan dan perluasan kelapa. Mempertimbangkan bahwa kemampuan sumber dana Pemerintah daerah terbatas, maka agar kegiatan peremajaan dan perluasan kelapa secara utuh dapat terlaksana, perlu diupayakan komplementasi dari berbagai sumber dana lain termasuk diantaranya swadaya petani, agar kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan.

Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa rusaknya ribuan hektare kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), rusak akibat terendam air laut pascajebolnya tanggul pengaman kebun. Permasalahan tersebut terjadi adalah diantaranya disebabkan oleh perusahaan yang telah melakukan kerjasama pengelolaan trio tata air dengan Kelompok Tani yang tidak bertanggungjawab atas jebolnya tanggul pengaman

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebun, akibatnya air asin masuk dan merendam kebun masyarakat. Ketidak keseriusan pihak perusahaan untuk mengatasi permasalahan hancurnya kebun kelapa masyarakat ini. Oleh karenanya perlunya Pemerintah Daerah bertindak segera mencarikan solusi penyelesaian masalah rusaknya ribuan hektar kebun kelapa petani, karena ini menyangkut penghidupan mereka.

e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan, dengan indikator sebagai berikut :

Terlaksananya pembangunan tanggul mekanik perkebunan rakyat, terbangunnya tanggul manual perkebunan rakyat, terbangunnya jalan usaha perkebunan, terbangunnya pintu klep, terlaksananya normalisasi saluran dan parit seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

No.	Indikator	Target Capaian setiap Tahun	
		2012	2013
1	Panjang Tanggul Mekanik (KM)	420	419
2	Panjang Tanggul Manual (KM)	55	61
3	Panjang Jalan Usaha Perkebunan (KM)	60	70
4	Pintu Klep (Unit)	45	50
5	Panjang Saluran dan Parit (KM)	146	150

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, Tahun 2013

Dari data di atas, diketahui bahwa indikator pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah sudah dilakukan, namun penempatan bangunannya saja yang kurang tepat. Hal ini sesuai dengan wawancara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan para petugas penyuluh di lapangan yaitu Ibu Susi yang menuturkan sebagai berikut :

> *"Proyek yang dibangun kebanyakan tidak tepat sasaran, karena tidak dibangun pada kebun kelapa rakyat namun lebih banyak dibangun di areal perkebunan kelapa milik oknum tertentu....."*

Selain penyataan di atas, juga disampaikan juga hasil wawancara dengan Bapak Saekun penyuluh peratanian dalam waktu yang sama sebagai berikut :

> *"Sistem drainase tidak berjalan dengan baik, parit-parit yang terdapat pada kebun kelapa sudah dangkal dan jumlah paritnya yang sangat sedikit, di perparah lagi dengan masuknya air asin ketika air pasang, dan naiknya permukaan air parit sampai memenuhi lahan kebun sewaktu hujan turun. system drainase pada daerah-daerah yang telah disebutkan di atas sangat buruk. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan tanaman kelapa yang tidak produktif....."*

Hal ini juga penulis tanyakan kepada Bapak Ir. Junaidi anggota DPRD yang menuturkan sebagai berikut :

> *"Perbaikan dan pembuatan drainase seharusnya mendapat insentif dari pemerintah daerah karena pembuatan salauran drainase sulit untuk dilakukan petani kelapa secara manual. Hal ini dikarenakan perekonomian petani kelapa local kurang mampu dan miskin....."*

Selain itu, bapak Surya dari Dinas Perkebunan menuturkan sebagai berikut :

> *"Mayoritas pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran dikerjakan dan dilaksanakan oleh penyedia dari pihak ketiga yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan umum,. Di dalam pelaksanaannya, seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa hal diantaranya lamanya proses pelelangan umum dan disebabkan oleh pihak ketiga yang lambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak....."*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ketua Komisi B yaitu Bapak Ir. Junaidi menuturkan sebagai berikut :

> *"Pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang, seperti jalan produksi dan gorong-gorong pada lahan perkebunan untuk mendukung akses distribusi hasil perkebunan masih rendah. Kemampuan pemerintah untuk membangun masih sangat terbatas. Oleh karenanya, sangat diharapkan upaya swadaya dari petani untuk membangunnya..... ".*

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dan dilihat dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan melalui pembangunan tanggul mekanik perkebunan rakyat, tanggul manual perkebunan rakyat, jalan usaha perkebunan, terbangunnya pintu klep, normalisasi saluran dan parit sudah terlaksana dengan baik namun penempatan bangunannya saja yang kurang tepat. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan tidak tepat sasaran, pembangungan *system drainase* yang tidak tepat dan lamanya proses pelelangan umum untuk kegiatan program kegiatan pembangunan yang ada sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan yang mempengaruhi kerusakan lahan pembangunan menjadi bertambah.

2. Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum semuanya mengetahui dan paham mengenai isi dari Perda Nomor 14 tahun 2009 tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal, apa yang disampaikan oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bapak M. Nopriyanto selaku informan dan juga Petani Kelapa Lokal pada wawancara sebagai berikut :

> *"Ulun kadak tahu Buk ai, apanya isi dari Perda Nomor 14 Tahun 2009 tu. Kadak suah ulun umpat Sosialisasinya buk ai. Meitihi isinya gin kadak suah. (saya tidak tahu bu, apa isi Perda Nomor 14 Tahun 20009. Tidak pernah saya mengikuti sosialisasinya. Melihat isinya pun saya tidak pernah)....."*

Selain itu petani kelapa lokal yang merupakan petani di Desa Pebenaan menuturkan bahwa :

> *"Kami ni apanya pang buk ai, urang tinggal di daerah terpencil ni kadak suah tahu tentang Peraturan Daerah nang kayak itu. Wadah kami ni jauh buk ai, amun ada petugas datang kesini wah bersyukur bangat kami buk ai, ni apanya pang ada. Sebulan sekali gin ngalih petugas handak kesini buk ai. (Kami ni apalah buk, tinggal di daerah terpencil tidak pernah tahu apa itu tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009. Tempat kami ni jauh, kalau ada petugas yang datang kesini kami sangat bersyukur, ni apalh ada. Sebulan sekali petugasnyapun saliy mau datang ke sini)....."*

Selain itu petani kelapa lokal yang merupakan petani di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka dengan latar belakang Pendidikan S1 Guru yaitu Ibu Yurniasih menuturkan bahwa :

> *"Saya tahu dan paham isi dari perda tesebut, karena saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Dan memnag kebijakan tersebut sedikit membantu kami dalam mengelola kebun kelapa ini....."*

Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal juga dimintakan konfirmasinya kepada salah seorang petugas yang bertugas memberikan penyuluhan yaitu Pak Saekun mengungkapkan sebagai berikut :

> *"Saya tidak mengetahui apa Itu Perda Nomor 14 Tahun2009, lagipula saya tidak pernah dapat sosialisasinya. Kemungkinan karena ini tupoksinya Dinas Perkebunan, jadi kami dari BP2KP tidak mengetahuinya. Malahan*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

sejak ibu bertanya inilah baru saya tahu bahwa ada Perda yang mengatur tentang peningkatan pendapat Petani kelapa lokal tersebut……"

Hal ini juga penulis tanyakan kepada Pegawai Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir, yaitu Bapak Surya Syurgana Akmal yang menuturkan sebagai berikut :

"Sebenarnya saya mengetahui isi tentang Peraturan Daerah tersebut, hanya saja saya kurang memahami isinya secara jelas. Karena kami juga dari petugas hanya mengartikan masing-masing….."

Menurut anggota DPDR Komisi B yaitu Zulkifli mengungkapkan bahwa :

"Masyarakat secara umum kurang memahami isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut, karena Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan juga terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi bagi dinas terkait khususnya Dinas Perkebunan untuk mejangkau seleuruh pelosok Kabupaten Indragiri Hilir….."

Dari pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa ternyata belum semua pihak memahami isi dari baik dari peraturan daerah nomor 14 tahun 2009 baik dari petani kelapa lokal maupun dari aparat pemerintah sendiri.

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Komunikasi

   a. Kejelasan informasi seputar pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal kepada masyarakat terutama petani kelapa

      Informasi seputar pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal kepada petani kelapa lokal para informan memberikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

keterangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Syahroni di Desa Pulau Palas Kecamatan Tempuling, yaitu:

> *"Sosialisasi yang diberikan pemerintah pada kami ni kadak ada buk ai , ditambah lagi petani kelapa nang kayak ulun ni, sekulah sampai SMP narai pang. Kayak apa handak nyambung pandiran tu buk. Majal dah utak ni., (Sosialisai yang diberikan pemerintah pada kami ni tidak pernah samapai ke kami buk, ditambah lagi petani kelapa kayak saya ni sekolah hanya sampai SMP. Macam mana komunikasi tu mau baik, otak ni dah bodoh buk)....."*

Pernyataan dari Bapak Syahroni ini dibenarkan oleh Bapak Luffy (petani kelapa lokal) di Desa Pungkat yang menyatakan sebagai berikut :

> *" Sosialisasi ini tidak pernah sampai ke kami yang berade di pelosok ini buk....."*

Pernyataan ini juga kami konfirmasi kepada pemerintah yaitu Bapak Surya yang mengatakan bahwa kurang sosialisasi, berikut petikannya :

> *"Sosialisasi dari pemerintah daerah ada buk,, hanya saja belum menjangkau seluruh desa yang ada di Indragiri Hilir. Ya biasalah buk kami dibatasi oleh anggaran yang ....."*

Senada dengan pendapat diatas Ibu Yurniasih di Desa Sungai Luar selaku salah satu petani kelapa lokal di Kabupaten Indrgairi Hilir menyatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan tetapi belum menyeluruh, berikut petikan wawancaranya :

> *"Sosialisasi sudah dilakukan tetapi belum menyeluruh sampai ke pelosok desa, apalagi desa-desa yang di daerah utara yang dekat dengan laut dan transportasi masih sangat bergantung dengan air pasang ....."*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Ibu Susi dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang mengungkapkan bahwa sudah dilakukan sosialisasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, berikut penuturan beliau :

> *"Sudah, Perda Nomor 14 Tahun 20009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal sudah disosialisasikan ke masyarakat bahkan sudah dilaksanakan....."*

Dari wawancara yang dilakukan dapat dicermati bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan petugas kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal tidak maksimal. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan dilakukan pada daerah tertentu kemudian informasi yang disampaikan tidak dapat dicerna oleh masyarakat karena rata- rata pendidikan petani kelapa yang ada rendah.

Untuk mengatasi kurangnya pelaksanaan sosialisasi kepada petani kelapa, maka perlunya kinerja petugas penyuluh berperan aktif dalam menyampaikan tujuan dan sasaran program pemerintah sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009. Keaktifan petugas penyuluh disetiap Kecamatan dalam memberikan informasi dan binaan kepada petani kelapa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatasi setiap permasalahan dan hambatan petani kelapa setiap daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat menetapkan program prioritas yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

tepat bagi peningkatan pendapatan petani kelapa sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009.

b. Kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada petani kelapa lokal

Dalam hal kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada Petani Kelapa Lokal, hampir semua informan berpendapat sama bahwa informasi yang diberikan oleh petugas masih sangat minim sekali sehingga implementasinya di lapangan memperlihatkan masih banyak petani kelapa yang tidak melakukan apa yang menjadi program Pemerintah Daerah, berikut pernyataan dari Bapak M. Nopriyanto:

> *"Setahu ulun kadak suan ulun dapat sosialisasi tentang Perda tu Buk ai, petugasnya gin ulun kadak tahu yang mana urangnya " (setahu saya tidak pernah dapat sosialisasi tentang perda itu buk, petugasnya pun saya tidak tahu siapa orangnya)....."*

Hal ini senada apa yang dikatakan oleh pak Saekun :

> *"Kami para petugas bagaimana mau melakukan sosialisasi ke petani kelapa, karena anggarannya memang tidak ada. Selain itu karena kelapa ini merupakan tanaman tahunan, jadi tidak perlu repot-repot melakukan sosialisasi karena petani sudah mengetahui cara mengolahnya..... "*

Dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas penyuluh kepada petani kelapa masih sangat minim. Hal ini disebabkan masih terdapat petani yang tidak mengenal petugas penyuluh yang ada di daerahnya kemudian kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyampaikan pesan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009.

c. Ketepatan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

Tidak tepatnya informasi petugas kepada petani kelapa terhadap tujuan dan sasaran Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa menyebabkan kebingungan-kebingungan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nawar Di Desa Bolak :

> *"Kalau isi Perda tersebut saya tidak tahu, tetapi kalau kelapa bisa diolah menjadi kopra, gula merah, nata de coco, saya tahu bu. Terus kebun kelapa tu aliran airnya harus lancar dengan membuat parit saya tahu bu....."*

Sebagaimana wawancara yang dilakukan diketahui bahwa belum terjalinnya komunikasi yang tepat antara Pemerintah daerah melalui petugas penyuluh di daerah dalam menyampaikan pesan Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa. Hal ini dimaksudkan belum terlaksana proses komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan sehingga tujuan dan sasaran program pembangunan bagi petani kelapa belum berjalan secara maksimal. Informasi tentang kebijakan yang ada belum jelas, belum lengkap dan belum tepat diterima oleh petani kelapa.

Perlunya rutinitas pertemuan antara petugas penyuluh lapangan yang mengikut sertakan kelompok petani, LSM dan Upika Kecamatan dengan petani kelapa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Sehingga informasi yang didapatkan oleh petani kelapa tentangb pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa dapat diterima dengan baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

2. Sumber Daya

a. Kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal

Kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal dilihat dari tidak semua petugas penyuluh yang mengetahui dan memahami secara tepat isi dari Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Bapak Ngadiyo (Kasi Perencanaan Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir) yang menuturkan sebagai berikut :

> *"Ya, saya mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Sosialasi berupa pengarahan kepada petani kelapa lokal telah kita laksanakan hanya saja tidak semua dapat kita laksanakan karena keterbatasan anggaran Pemerintah.... "*

Hal ini juga penulis tanyakan kepada Bapak Surya selaku Kasi Pengolah air dan lahan pada dinas perkebunan Kab. Indragiri Hilir yang menyatakan sebagai berikut :

> *"Saya mengetahui tentang Perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut, hanya saja saya tidak memahami secara jelas sehingga sulit juga mensosialisasikan secara utuh dan tepat tujuan lahirnya Peraturan Daerah tersebut..... "*

Dari wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa kurangnya kemampuan petugas dalam memahami Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal sehingga tujuan dan sasaran kebijakan tidak dapat diterima dengan baik oleh petani kelapa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

Untuk itu perlunya peningkatan kemampuan petugas penyuluh melalui bimbingan teknis dalam mempelajari Perda Nomor 14 Tahun 2009 sehingga kerancuan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut dapat teratasi.

b. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan petani kelapa lokal mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Dalam kaitannya dengan kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan petani kelapa lokal Bapak Saekun selaku petugas penyuluh perkebunan yang menuturkan sebagai berikut :

> *" Sebenarnya saya sendiri baru mengetahui adanya Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini dari ibu, saya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir. Apalagi saya mau mensosisasikannya..... "*

Dari wawancara yang ada dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi petugas penyuluh dalam memberikan informasi tentang Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal tidak memadai. Hal ini disebabkan petugas penyuluh belum dilibatkan dalam sosialisasi Perda dimaksud sehingga komunikasi yang dilaksanakan dilapangan tidak maksimal.

Untuk itu kiranya perlunya bimbingan teknis dan peningkatan pertemuan rutin dalam memberikan pengetahuan kepada petugas penyuluh untuk mendalami Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal sehingga tujuan dan sasaran dapat diimplementasikan kepada petani kelapa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

c. Jumlah personil yang diturunkan dalam implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Dari hasil wawancara dengan Bapak Surya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan hal sebagai berikut :

> *" Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian mengendalikan organisme pengganggu tanaman, karena memang belum ada aparatur yang berlatar belakang pendidikan itu....."*

Dari wawancara diperoleh kesimpulan bahwa kurangnya jumlah petugas penyuluh yang ada pada Dinas Perkebunan dan Badan Ketahanan Pangan terutama tenaga ahli khususnya petugas yang menangani masalah organisme penganggu tanaman. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja pelaksanaan tugas dinas/instansi terkait dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung kinerja organisasi.

Perlunya rekruitmen petugas penyuluh yang memiliki pendidikan dan spesifikasi disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kurangnya jumlah petugas penyuluh pada dinas/instansi terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Komposisi Jumlah Penyuluh Perkebunan (PNS) pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Pendidikan Formal Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Ideal Jumlah Penyuluh	Jumlah Penyuluh Perkebunan	Tingkat Pendidikan
1	Tembilahan	8	8	4	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 2 Orang - SPMA Pertanian 1 Orang
2	Tempuling	9	9	2	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 1 Orang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

3	Kempas	12	12	6	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 4 Orang - SPMA Pertanian 1 Orang
4	Keritang	17	17	3	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 2 Orang
5	Enok	14	14	3	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 2 Orang
6	Tanah Merah	10	10	3	- D.3 Pertanian 1 Orang - SPMA Pertanian 2 Orang
7	Gaung Anak Serka	12	12	1	- D.3 Pertanian 1 Orang
8	Gaung	16	16	3	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 1 Orang - SPMA Pertanian 1 Orang
9	Kateman	11	11	1	- D.3 Pertanian 1 Orang
10	Reteh	14	14	1	- D.3 Pertanian 1 Orang
11	Kemuning	12	12	5	- S.1 Pertanian 1 Orang - D.3 Pertanian 4 Orang
12	Kuala Indragiri	8	8	-	-
13	Concong	6	6	-	-
14	Sungai Batang	8	8	-	-
15	Mandah	17	17	-	-
16	Pelangiran	16	16	-	-
17	Teluk Belengkong	13	13	-	-
18	Pulau Burung	14	14	-	-
19	Tembilahan Hulu	6	6	-	-
20	Batang Tuaka	13	13	-	-
Jumlah total		**236**	**236**	**32**	

Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2013

UNIVERSITAS TERBUKA

Dari tabel tersebut dapat diinformasikan bahwa kondisi pendidikan formal yang dimiliki satuan kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir semua berlatar belakang berpendidikan Pertanian, namun belum ada yang ahli tentang pengendali organisme pengganggu Tanaman. Selain itu, jumlah petugas yang ada masih kurang dilihat dari kebutuhan organisasi, dan masih terdapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecamatan yang belum memiliki petugas penyuluh. Hal ini sesuai disampaikan oleh petugas penyuluh yaitu Bapak Saekun :

> *"Petugas penyuluh perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat kurang secara kuantitas. Sebenarnya hal ini dapat diatasi oleh Pemerintah dengan mengangkat Petugas Penyuluh Swadaya dari Tokoh Masyarakat ataupun Petani Kelapa lokal yang mampu memberikan sosialiasi mengenai isi Perda dimaksud....."*

Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak didukung dengan kuantitas petugas penyuluh yang memiliki pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sikap

   a. Persepsi Petani Kelapa Lokal Di Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Wawancara dengan Bapak Wagino petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Indragiri Hilir :

> *"Kurangnya koordinasi antara petugas yang lama dengan yang baru sehingga dalam melaksanakan pembinaan kepada Petani kelapa lokal dapat menimbulkan kesalahan persepsi....."*

Manfaat dari Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini, juga dikonfirmasikan dengan Bapak Surya dari Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir mengungkapkan sebagai berikut :

> *"Manfaat yang didapat dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini adalah dapat mendorong para petani kelapa lokal yang semula hanya mengolah kelapa menjadi kopra sekarang bisa*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

bermacam-macam produk olahan yang mempunyai nilai ekonomi baik....."

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Petani Kelapa Lokal yaitu Bapak Luffy yang menuturkan sebagai berikut :

"Ya lebih enak kalo dalam perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut ada mengatur tentang harga kopra buk, jadi ada standarisasinya. Kadak sakahandak perusahaan hajak menentapkan harga kopra. (Ya lebih enak kalau ada perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut ada yang mengatur tentang harga kopra bu, jadi ada standirisasinya. Tidak semau perusahaan saja menetapkan harga kopra)....."

Dari wawancara diketahui bahwa persepsi petani kelapa terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal tidak memadai. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran Perda yang ada, kebutuhan petani kelapa terhadap permasalahan dan hambatan dalam peningkatan pendapatan petani kelapa lokal seperti penetapan harga kopra, bantuan permodalan, teknologi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan produk kelapa. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nopriyanto :

"Diharapkan pemerintah dapat menerbitkan standar harga Kopra perkilonya, sehingga kami petani ni kadak menjerit lagi. Nyaman jua agin makan sehari awan anak sekulah....."

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andi Kurniawan yang mengatakan bahwa :

"Masalah kami disini adalah parit yang tesumbat buk, jadi ngaleh air pasang tu handak turun. Pas air pasang maka am tanggalam tu pang jalasnya dah kabun nyiur kami ni". (Masalah kami di sini adalah parit yang tidak mengalir, jadi susah air pasang mau mengalir. Pada saat air pasang maka kebun kelapa kami pun ikut tenggelam.... ".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

Informasi mengenai implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal juga perlu lebih ditingkatkan lagi. Selaku Anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir Bapak Herwanisitas (anggota Komisi B) mengungkapkan harapannya:

> *"Agar masyarakat lebih mengetahui, menyadari dan akhirnya melaksanakan, maka sebaiknya pengetahuan tentang perkebunan kelapa ini dimasukkan dalam kurikulum anak sekolah terutama SMK, jika sosialisasi dari tingkat yang paling bawah seperti anak-anak, hal tersebut pasti akan terbawa hingga mereka dewasa....."*

Dari wawancara dapat diketahui bahwa persepsi petani kelapa lokal sangat berkaitan dengan informasi mengenai Perda tersebut. Persepsi petani kelapa dipengaruhi dengan rendahnya harga kopra, program pemerintah yang mendukung sarana prasarana perkebunan dan pengetahuan petani kelapa dalam memahami Perda.

Untuk itu perlu kiranya pemerintah daerah dapat meningkatkan program yang membantu petani kelapa, penentuan standar harga kelapa yang stabil serta pengetahuan melalui sosialisasi yang tepat sasaran sehingga meningkatkan pendapatan bagi petani dalam mengolah hasil perkebunan.

b. Sikap Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Menurut informan dengan adanya Perda tersebut dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Petani Kelapa Lokal untuk meningkatkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendapatannya Seperti yang disampaikan oleh Bapak Udin Desa Tasik Gemilang :

> *" Peraturan tersebut sangat perlu karena ulun tebantu khususnya pada program peremajaan kebun. Memang kebun kami ni sudah lawas, dari zaman paninian baharik. (Peraturan tersebut sangat perlu bagi kami petani khususnya pada program peremajaan kebun. Memang kebun kami ni sudah lama, dari zaman nenek kami)....."*

Senada dengan pendapat Bapak Udin, Ibu Rahmataniah juga mengatakan :

> *"Bahwa Perda tersebut sangat berguna sekali untuk kesejahteraan petani kelapa lokal, namun perda tersebut belum berjalan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada petani kelapa local..... "*

Dari wawancara diperoleh kesimpulan bahwa Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membantu pendapatan petani kelapa namun pelaksanaanya belum berjalan maksimal terutama masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pada petani kelapa pada daerah Kecamatan, pelaksanaan program kegiatan yang belum tepat sasaran dan kemampuan petugas penyuluh yang belum memadai dalam melaksanakan Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

D. Faktor Lain

1. Faktor Pendukung

Faktor lain yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah perlunya dukungan dari lembaga pendidikan dengan dimasukannya dalam kurikulum sekolah tentang pengetahuan perkebunan kelapa. Perlunya informasi kepada masyarakat untuk mencari pangsa pasar produk kelapa seperti yang disampaikan oleh Bapak Herwanisitas (Anggota DPRD Komisi B) yaitu :

> *"Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi menurut saya pentingnya pengetahuan petani kelapa lokal dalam mengolah kelapa lokal mulai dari buah kelapa, batang kelapa, sabut, lidi dan lain sebagainya agar dimasukkan dalam program sekolah khususnya SMK Pertanian yang ada di Kecamatan Kempas....."*

Faktor pendukung lainnya seperti yang dituturkan oleh Bapak Surya dari Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir sebagai berikut :

> *"Keberpihakan Pemerintah dalam menganggarkan dalam APBD mengenai Pendidikan dan pelatihan petani kelapa lokal, Pembuatan Tanggul, peremajaan Kebun kelapa yang sudah tua, dan bantuan teknologi modern..... "*

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa faktor pendukung Perda adalah pengetahuan petani kelapa lokal dalam mengolah hasil produk kelapa dan dapat diberikan melalui program pendidikan khususnya SMK Pertanian yang ada. Adanya keberpihakan Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi, program kegiatan pembangunan terhadap rehabilitasi lahan yang rusak serta peremajaan bagi lahan yang tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

produktif sehingga dapat membantu pendapatan petani kelapa dalam menjalani usahanya.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah lemahnya pengawasan atau *Law Enforcement* yaitu dengan adanya kompromi tentang pembuatan tanggul seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susi dari Badan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

> *"Program pembuatan tanggul sudah bagus, hanya saja sasarannya belum tepat sasaran karena ada kong kali kong penempatan tanggul yang bisa berpindah ke tempat lain....."*

Selain itu faktor penghambat lainnya seperti yang dituturkan oleh Bapak Surya dari Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir sebagai berikut :

> *"Sebenarnya perda ini sudah bagus karena ada road map bagi Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal, hanya saja respon dari masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masih sangat kurang....."*

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam implementasi adalah pendidikan petani kelapa lokal yang masih berpendidikan rendah yaitu pada umumnya hanya sampai Sekolah Dasar seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ngadiyo (Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir) :

> *"Sumberdaya manusia petani kelapa lokal masih sangat rendah sehingga sosialisasi yang kita berikan kurang nyambung....."*

Sebagaimana wawancara diketahui bahwa faktor penghambat dalam pengimplementasian Perda No. 14 Tahun 2009 dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

meningkatkan pendapatan petani kelapa dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan program kegiatan sehingga banyak terjadi salah sasaran, pendidikan petani kelapa lokal yang masih berpendidikan rendah sehingga tujuan dan sasaran Perda belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

E. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupten Indragiri Hilir

Kehadiran Asosiasi Petani Kelapa Lokal yang beranggotakan pada Petani Kelapa Lokal dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya dalam meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun keberadaan Asiosiasi kelapa ini kurang berperan maksimal karena tidak dapat memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan pendapatan Petani kelapa lokal, hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi dengan Bapak Syahroni di Desa Pulau Palas (petani kelapa lokal) menuturkan sebagai berikut :

> *"Sebujurnya kami sudah punya asosiasi kelapa Buk ai, namun keberadaannya kadak jua bepengaruh. Kadang muncul, kadang tanggalam". (sebenarnya kami sudah punya asosiai kelapa buk, tapi keberadaanya tidak juga berpengaruh. Kadang muncul, kadang tenggelam)....."*

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa lokal sangat kurang, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Saekun (petugas penyuluh lapangan), yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Pembinaan selama ini dilakukan bu, namun tidak dilakukan di tiap Kecamatan apalagi tiap Desa , maklumlah bu kalo hanya mengharapkan dana dari Pemerintah saja tidak cukup anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Apalagi Kabupaten Indragiri Hilir ini yang sangat bergantung dari Transportasi air, dimana kalau air pasang baru bisa jalan....."

Menanggapi usaha pemerintah daerah dalam hal peningkatan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Surya Syurgana Akmal Bapak Surya Surghana Akmal (Kasi pengolahan lahan dan air Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir) menyampaikan sebagai berikut :

"Ada beberapa upaya yang telah kita lakukan bebrerapa tahun terakhir ini sejak Peraturan daerah tersebut diterbitkan antara lain melakukan Penyuluhan ke petani kelapa lokal mengenai diversifikasi tanaman kelapa baik secara vertikal maupun horizontal, memberikan bimbingan teknis kepada petani kelapa, pembuatan tanggul,dan proram trio tata air ..."

Wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan di Desa Seberang Tembilahan yang menuturkan sebagai berikut :

"Aku kadak suah tahu buk ai amun ada Perda nang tu, apalagi program-program nang ibuk tanyakan tuk. Padahal kami ni parak awan Tembilahan Buk ai, tapi kadak suah aku tahu ada program-program tu ". (saya tidak pernah tahu bu tentang perda itu, apalagi program-program yang ibu tanyakan tersebut. Padahal kami ini dekat dengan ibu kota kabupten Tembilahan, tapi tidak pernah tahu ada program-program itu)....."

Hal yang sama disampaikan oleh anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir yaitu Herwanisitas yang menuturkan bahwa :

"Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membantu petani kelapa lokal dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal yaitu dengan membuat master plan berupa Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini, hanya saja hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal....."

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari wawancara mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal diketahui bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini diketahui dari kurang aktifnya lembaga asiosiasi kelapa dalam membantu permasalahan petani kelapa sehingga permasalahan petani kelapa selalu terabaikan, pembinaan terhadap petani kelapa yang tidak maksimal karena terbatasnya kemampuan petugas penyuluh memberikan informasi kepada petani kelapa serta pemberdayaan petani melalui diversifikasi tanaman kelapa baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjukkan hasil yang memadai.

Petani kelapa di berbagai daerah berada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena rendahnya produktivitas serta harga kopra yang rendah dan fluktuatif. Akibat rendahnya pendapatan, petani kelapa menjadi kurang termotivasi untuk mengusahakan lahan perkebunan menjadi lebih baik terutama melihat lahan yang selalu rusak dan kritis akibat tidak terbangunnya infrastruktur yang mendukung program pembangunan perkebunan dengan baik. Program kegiatan perkebunan selalu terabaikan dengan karena alokasi dana dan pengawasan yang tidak memadai kemudian kurangnya sosialisasi yang diperoleh petani kelapa dalam mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan Pemerintah daerah dalam membantu pendapatan petani kelapa. Selanjutnya kondisi tersebut diperburuk oleh hubungan antara petani sebagai penghasil bahan baku dengan industry pengolahan belum terjalin sebagai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga seluruh nilai tambah yang dihasilkan dari proses pengolahan hanya dinikmati oleh industri atau pengolah yang selalu menjadi pihak yang selalu menerima keniscayaan karena harga kopra tidak stabil dan terkesan dipermainkan oleh industry pengolahan. Oleh karena itu apabila tanpa adanya perubahan mendasar dari cara pandang berbagai pelaku agribisnis kelapa termasuk pemerintah maka kondisi petani kelapa akan tetap terpuruk. Lemahnya keberdayaan petani kelapa ditunjukkan oleh sulitnya mereka mengemukakan pendapat dalam mengambil keputusan, posisi petani kelapa diposisikan sebagai objek dan kurang dilibatkan dalam perencanaan sehingga dalam aktivitas pengelolaannya selalu dirugikan.

Untuk itu perlunya pemberdayaan petani kelapa melalui peran aktif Pemerintah Daerah dan petani kelapa sendiri dalam melaksanakan Perda sebagai tuntutan dasar hukum yang legal membantu meningkatkan pendapatan petani kelapa. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melahirkan Perda No. 14 Tahun 2009 sebagai fasilitas membantu pendapatan petani kelapa lokal akan niscaya apabila implementasi Perda dimaksud belum tepat dan sesuai apabila unsur berkepentingan (Pemerintah, petani kelapa dan swasta) tidak seiring dan sepaham dengan tujuan dan sasaran Perda yang ada.

Implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 sebagai fasilitas membantu pendapatan petani kelapa lokal tidak akan berjalan dengan baik apabila perubahan tidak tercapai dalam mengembangkan kemampuan petani sehingga dapat mengolah permodalan dengan baik, mempergunakan teknologi pengolahan hasil perkebunan, dan inisiatif untuk pemasaran hasil produksi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

kelapa, termasuk membuat rencana, memproduksi, mengelola, memasarkan serta melihat setiap peluang yang ada. Pemanfaatan sumber daya petugas penyuluh secara efisien melalui pengembangan sistem pertanian berkelanjutan dengan usaha pokok tanaman perkebunan, peningkatan diversifikasi usaha perkebunan sebagai sumber pendapatan, menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani serta meningkatkan daya saing hasil usaha tani dan olahannya.

Oleh karena itu perlunya peningkatan Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani sebagai fasilitator dan regulator dalam memberdayakan petani dan pihak swasta sebagai mitra usahanya untuk lebih terjalin harmonis. Pemberdayaan petani kelapa merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani serta memperbesar kontribusi petani dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan perkebunan kelapa dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan dukungan penyuluhan dan pelatihan yang tepat sasaran dan kebutuhan petani kelapa, mengaktifkan dan memfungsikan kelembagaan petani, pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan produksi kelapa sesuai dengan spesifik daerah, memberikan bantuan permodalan kepada petani dalam bentuk bantuan dana bergulir dan kredit. Dimana pemberdayaan dapat dilakukan secara bertahap.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

F. Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

Setelah data dari lapangan disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis mengenai implementasi Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi implementasi kebijakan, faktor-faktor pendorong dan penghambat proses implementasi. Pembahasan analisis berdasarkan sajian data di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal

   Berdasarkan uraian hasil penyajian data diatas diketahui proses implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal artinya dalam proses pelaksanaannya dan penerapan isi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 oleh implementor kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Petani Kelapa Lokal masih belum cukup berhasil mencapai tujuan kebijakan tersebut. Belum optimalnya proses implementasi tersebut dikarenakan :

   a. Belum tercapainya target yang diinginkan oleh pemerintah karena kekurangan dana dan sumberdaya manusia yang kompeten khususnya pada sumber daya aparatur yang memiliki keahlian mengendalikan organisme pengganggu tanaman.

   b. Kurangnya pemahaman Petani Kelapa Lokal terhadap isi kebijakan;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah (Kabupaten Indragiri Hilir) dalam meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir sampai saat ini juga belum berhasil.

d. Kurang berperanya sektor swasta secara maksimal;

e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam swadaya pembuatan tanggul dan peremajaan kebun kelapa;

2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

a. Komunikasi

Dalam hal komunikasi, dilihat dari hasil penyajian data yang telah penulis uraikan diatas dapat digambarkan bahwa proses komunikasi antara pembuat kebijakan, implementor kebijakan dan sasaran kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal secara umum berjalan cukup lancar namun apabila kita melihat dari aspek komunikasi seperti :

1. Kejelasan informasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal dalam proses komunikasi itu belum berjalan secara optimal dimana pelaksana kebijakan masih belum bisa memahami secara utuh informasi kebijakan yang harus mereka laksanakan demikian juga dengan sasaran kebijakan.
2. Selain kejelasan informasi masalah kecukupan informasi dan ketepatannya juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecukupan informasi petugas pelaksana dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan-pesan kebijakan seyogyanya memiliki kecukupan informasi yang sesuai dengan harapan sasaran kebijakan akan tetapi temuan penulis dilapangan tergambar bahwa para petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan justru menemukan kendala, karena kurangnya informasi kebijakan yang mereka miliki yang disebabkan dikarenakan kurangnya sosialisasi.

Ketepatan informasi dalam penyampaian informasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan masih merasakan proses penyampaian informasi belum tepat. Ketepatan informasi dalam proses komunikasi pada penelitian ini tergambar bahwa sasaran kebijakan belum merasakan informasi yang disampiakan oleh petugas sesuai dengan isi kebijakan.

Adapun faktor pendorong Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Adanya kerjasama yang baik antara penyuluh dalam melakukan sosialisasi
2. Adanya keinginan para penyuluh dalam membantu Petani dalam meningkatkan kesejahteraan Petani kelapa lokal;
3. Pemahaman petugas penyuluh terhadap isi kebijakan baik.

Selanjutnya faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Tingkat pendidikan Petani kelapa local yang pada umumnya masih rendah;
2. Usia petani kelapa local yang pada umumnya sudah tua;
3. Banyaknya kebun kelapa local yang berada di daerah pedalaman sehingga akses masuk sangat sulit dan masih tergantung pada air pasang.daerah yang dipengaruhi oleh air pasang.
4. Tidak adanya pelatihan bagi petugas dalam pemahaman isi Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2009.
5. Kurang antusiasnya petani kelapa dalam menerima isi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009.

b. Sumber Daya

Sebagaimana komunikasi, dalam penyajian data aspek sumber daya, dalam implementasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal dalam penelitian ini tergambar bahwa :

1. Kemampuan sumber daya pelaksana kebijakan dalam memberikan pengarahan pengimplementasian kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal masih belum optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan/keterampilan sumber daya pelaksana dalam melaksanakan tugas
2. Selain dalam memberikan pengarahan kurangnya kemampuan sumber daya pelaksana dalam berkomunikasi dengan Petani Kelapa Lokal mengenai kebijakan peningkatan pendapatan menurut penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

disebabkan oleh kurangnya penguasaan informasi dan cara berkomunikasi yang efektif.

3. Jumlah personil dalam hal ini petugas atau personil yang mengimplementasikan (pembinaan, pengawasan) kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal sangat jauh dibandingkan dengan jumlah petani kelapa lokal
4. Kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani kelapa lokal.

Petugas dari Dinas Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir banyak yang belum mengetahui dan memahami isi kebijakan peningkatan kesejahteraan petani kelapa lokal berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2009. Selain itu, usia juga sangat mempengaruhi kualitas penyampaian isi kebijakan tersebut dimana banyak dari para petugas yang akan memasuki masa purna bakti. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Saekun :

> *"Sebenarnya saya sendiri belum memahami dengan pas apa yang diinginkan oleh Perda tersebut, apalagi mau menyampaikannya kepada petani kelapa lokal, selain itu banyak juga kawan-kawan saya yang akan memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak terlalu konsen lagi dalam bertugas....."*

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan mengenai implementasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal masih kurang maksimal.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Sikap Petugas, sebagai akibat masih adanya perbedaan persepsi petugas dalam pelaksanaan tugas, penulis menemukan sikap yang muncul dari petugas seperti kurang koordinasi dan kurangnya kerjasama antara petugas terutama antara petugas baru dan petugas lama.
4. Sikap Petani kelapa lokal, pada umumnya hanya menunggu bantuan dari pemerintah tanpa adanya swadaya. Padahal tujuan dari Perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut hanyalah bersifat katalisator untuk mengerakakn masyarakat dalam swadaya.

d. Faktor Lain

Selain fenomena yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya dan sikap, yang penulis amati dilapangan ternyata dalam proses implementasi kebijakan petani kelapa lokal dilapangan muncul fenomena lain yang menarik perhatian penulis yakni : kurangnya pengawasan dari instansi terkait/ Lemahnya penegakkan hukum terhadap pihak ketiga dalam melaksanakan proyek yang tidak tepat sasaran. Hal ini menurut penulis menjadi salah satu penyebab implementasi kebijakan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan optimal.

Selanjutnya sebagaimana faktor yang lain dalam struktur birokrasi juga terdapat faktor-faktor yang pendorong ataupun menghambat kelancaran implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009. Faktor pendorong dalam struktur birokrasi ini adalah :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

1. Adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lainnya, yang secara jelas telah diatur dalam tupoksi masing-masing dinas/instansi pelaksana yaitu Dinas Perkebunan dan Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan pangan.
2. Adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

5. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan Petani Kelapa Lokal

Dalam kaitannya dengan kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan produsen petani kelapa lokal Kepala Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir melalui Kasubbag Program Bapak Suparjo menyampaikan sebagai berikut :

> *"Karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelatihan maupun sosialisasi program-program peningkatan pendapatan petani kelapa lokal, maka kami tidak mampu memberikan sosialisasi pada setiap petani pada tiap Kecamatan....."*

c. Sikap

Dari hasil penyajian data tergambar sikap implementor kebijakan atau petugas dan petani kelapa lokal dalam proses pengimplementasian kebijakan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum menunjukkan sikap yang mendukung pengimplementasian kebijakan secara optimal hal ini dapat terlihat dari :

1. Persepsi Petugas dalam melaksanakan tugas pembinaan secara umum cukup baik tetapi menurut penulis masih banyak ditemukan petugas yang memiliki pandangan yang belum utuh/sama diantara petugas apalagi dengan para produsen petani kelapa lokal terhadap implementasi kebijakan.
2. Sementara itu persepsi produsen terhadap isi kebijakan secara umum cukup memadai namun penulis masih menemukan pandangan petani kelapa yang tidak sama dalam memahami isi kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagaimana analisis yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan maksimal karena masih ada kendala antara lain :

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani kelapa lokal dalam mengelola perkebunan kelapa lokal, rendahnya kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan melalui Bank dan Program Bantuan Permodalan dari Pemerintah, belum maksimalnya diversifikasi tanaman perkebunan kelapa secara vertikal, masih rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah dan petani kelapa mengelola kerusakan dan kritis perkebunan, capaian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan yang belum tepat sasaran, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal.
2. Faktor penghambat dalam implementasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah kurangnya pengawasan dari instansi terkait dalam melaksanakan program perkebunan, pendidikan petani kelapa lokal yang masih berpendidikan rendah, proses komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan sasaran kebijakan secara umum belum berjalan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara maksimal dilihat dari kurang maksimalnya sosialisasi program pemerintah kepada petani kelapa, terbatasnya jumlah dan kemampuan petugas penyuluhan dan ketahanan pangan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melayani kebutuhan petani kelapa, minimnya teknologi peralatan produksi pertanian yang dimiliki oleh produsen dalam mendukung program petani kelapa lokal.

3. Faktor pendukung dalam implementasi peningkatan pendapatan petani kelapa lokal adalah adanya aturan atau regulasi yang memberikan peluang kepada petani kelapa dalam peningkatan pendapatan melalui alokasi dana, tersedianya sarana dan prasarana perkebunan rakyat, adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lainnya, yang secara jelas telah diatur dalam tupoksi dinas/instansi pelaksana, adanya prosedur pelaksanaan kebijakan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi dalam upaya peningkatan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan anggaran di sektor perkebunan khususnya untuk peremajaan kebun kelapa dan diversifikasi produk kelapa guna

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Peningkatan jumlah petugas teknis lapangan dengan cara memberdayakan petugas penyuluh dalam melakukan pembinaan agar dilaksanakan secara kontinyu khususnya penanganan hama tanaman kebun. Selain itu , perlu memberdayakan tokoh masyarakat dan petani kelapa lokal disetiap Desa untuk menjadi penyuluh swadaya agar dapat mempengaruhi cara pikir petani kelapa lokal dalam mengolah kelapa lokal.
3. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan agar masyarakat mau mendeversidikasi tanaman kelapa lokal secara mandiri.
4. Peningkatan pola kemitraan pemasaran antara petani kelapa lokal dengan dengan pihak industry pengolahan kelapa yang saling memberikan keuntungan sehingga terwujudnya tujuan dan sasaran yang tepat guna bagi peningkatan program perkebunan rakyat.

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Agustino, Leo. (2006). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hasibuan, Malayu S.P. (1996). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.

Hidayat, Syarifudin.(2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analisys. Yogyakarta. Gava Media.*

Islamy, Irfan. (2009). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Jones, Charles O. 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Publik Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.

Moloeng, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia.

_____. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo

Sarwono, Jonathan. (2006). *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Singarimbun M. & S. Effendi. (1991). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

UNIVERSITAS TERBUKA

Soenarko, (2005). *Public Policy:Pengertian Pokok untuk Memahami dan Menganalisa Kebijaksanaan Pemerintah.* Airlangga University Press, Surabaya.

Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

_____. (2006). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jak*arta: Citra Utama.

Tachjan.(2006). *Implementasi kebijakan publik.* Bandung : AIPI.

Wahab, Solichin Abdul. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua).* Jakarta: Bumi Aksara

_____. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samoedra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Raja Grafindo.

Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo.

_____. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2013, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 No. 14

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

Sumber Lain:

Ahmad Aris, dkk. *Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat terhadap Kemiskinan dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir*. 2010

Doah Dekok, Tarigans. *Diversifikasi Usaha tani Kelapa Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesian Centre for Estate Crops Research and Development. 2005

Kuswari, *Pengembangan Agribisnis Kelapa Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir* : Bogor. Institut Pertanian. 2005

Sudaryanto, Tahlim dan I Wayan Rusastra. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan.* Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2006

Sugiana, Puji Meilita. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (kube) di Jakarta Selatan*. 2012

Yusuf, M, *Strategi Dan Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indragiri Hilir. Skripsi Tidak Dipublikasikan*. 2004

http://www.damandiri.or.id/file/agustantobasmariipbbab2.pdf
repository.unpad.ac.id/bitstream/.../RINGKASAN%20DISERTASI.doc

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

Lampiran 1 Daftar pertanyaan (*Interview Guide*)

KUESIONER MASYARAKAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KELAPA LOKAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

UNIVERSITAS TERBUKA

INFORMASI UMUM

Penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i, berkenan untuk mengisi lembar kuesioner yang dibuat penulis, dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Meningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir". Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujurnya. Jawaban tersebut digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan kesejahteraan petani, faktor pendorong dan penghambat proses implementasi serta menemukan strategi peningkatan efektivitas implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Terima kasih atas partisipasi anda dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Sdr/i dapat menghubungi :

Nama	:	ZUL IRMA INDRA
Nim	:	016759938
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi	:	Magister Administrasi Publik
Alamat	:	Jl. Lingkar II Lr. Taman Sari I Tembilahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

A. Identitas Informasi

Nama : ..... Laki-laki/Perempuan

Usia : .....

Alamat : .....

Status : Kawin/Belum Kawin

Pendidikan : .....

Pekerjaan : .....

B. Panduan Wawancara/Interview Guide untuk petani kelapa

I. Implementasi

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui tentang Perda No. 14 Tahun 2009 tentang ?
2. Jika tahu, apakah Bapak/Ibu/Sdr mengerti maksud diterbitnya Perda No. 14 Tahun 2009 tersebut ?
3. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang Perda No. 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani ?
4. Bagaimanakah Bapak/Ibu/Sdr melakukan proses produksi kelapa lokal ? apakah hanya diolah menjadi kopra atau ada yang lain? Tolong jelaskan ?
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimanakah implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 ?
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah kelemahan dari kebijakan ini ? Bagaimana solusinya ?
7. Apakah ada pengawasan dari instansi yang berwenang terhadap program yang sudah dijalankan ? Kalau ada dari instansi mana saja ?
8. Semenjak menanam kelapa lokal, Apakah ada pelatihan sebagai berikut :

   a. untuk meningkatkan produktifitas kelapa berupa peremajaan kebun?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Tanaman sela dan diversifikasi tanaman kelapa lokal ?

c. Pembuatan tanggul dan parit ?

9 Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah meminjam uang ke Bank untuk perbaikan kebun kelapa ?

10. Apakah pernah dilaksanakan/mengikuti pameran kelapa baik tingkat lokal, nasional, maupun regional ?

11. Apakah ada perkumpulan/Asosiasi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ? Kalau ada bagaimana peranan Asosiasi tersebut ?

12. Apakah ada peremajaan kebun kelapa yang Bapak/Ibu/Sdr kelola ?

13. Apakah tanggul yang dibangun Pemerintah Daerah sudah mencukupi untuk kebun Bapak?

14. Apakah ada penggunaan teknologi dalam menanam, memelihara, dan mengolah kebun kelapa lokal ?

15. Apakah ada pembangunan tanggul mekanik dan manual ditempat Bapak/Ibu/Sdr ?

16. Kalau ada apakah telah mencukupi bagi areal perkebunan kelapa Bapak/Ibu/Sdr ?

17. Apakah ada alih fungsi lahan kebun kelapa yang sudah tua ?

II. Komunikasi

18. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perda No. 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani ?

19. Apabila tahu darimanakah Bapak/Ibu/Sdr mendengar mengenai informasi tersebut ?

20. Informasi seperti apakah yang Bapak/Ibu/Sdr terima tentang Perda No. 14 Tahun 2009 ?

21. Apakah Pemerintah atau Dinas terkait melakukan sosialisasi mengenai peningkatan kesejahteraan petani ?Apabila ada, siapakah yang melakukan sosialisasi ?Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr mendapatkan sosialisasi ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

22. Dalam Menyampaikan informasi apakah petugas konsisten dalam menyampaikannya ?

23. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dengan jelas tentang isi dari Perda No. 14 Tahun 2009 ? Jika tahu jelaskan !

24. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui dengan diberlakukannya Perda tersebut ?

25. Menurut Bapak/Ibu/Sdr berapa frekuensi petugas dalam memberikan informasi tentang peningkatan kesejahteraan petani ?

III. Sumber Daya

26. Menurut Saudara, bagaimana kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan atau pengarahan dalam implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 ?

27. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melakukan komunikasi dengan para petani dalam implementasi Perda No. 14 Tahun 2009 ?

28. Apakah jumlah personel yang diturunkan untuk memberikan sosialisasi sudah mencukupi ?

29. Bagaimana saran Bapak/Ibu/Sdr untuk petugas agar kebijakan peningkatan kesejahteraan petani dapat diterapkan ?

IV. Sikap

30. Apakah Bapak/Ibu/Sdr memahami isi Perda No. 14 Tahun 2009 mengenai peningkatan kesejahteraan petani ?

31. Bagaimana sikap para petugas dalam memberikan sosialisasi tentang peningkatan kesejahteraan petani ?

32. Bagaimana sikap Bapak/Ibu/Sdr sehubungan dengan Perda No. 14 Tahun 2009 ?Apabila tidak setujuh apa alasannya ?

33. Bagaimana persepsi bapak terhadap Perda No. 14 Tahun 2009 ?

34. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu/Sdr dalam mengimplementasikan Perda No. 14 Tahun 2009 ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

35. Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?

V. Fantor Lainnya

36. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa yang menjadi penghambat atau pendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan petani ?

37. Faktor apa yang menurut Bapak/Ibu/Sdr paling penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program ? Berikan alasan Bapak/Ibu/Sdr dan contohnya !

38. Bagaimanakah penilaian Bapak/Ibu/Sdr tentang program itu ?

39. Apakah ada saran/usul/pendapat dari Bapak/Ibu/Sdr, sehubungan dengan Peningkatan kesejahteraan petani ?

C. Panduan Wawancara / Interview Guide untuk petugas / Anggota DPRD

I. Implementasi

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui bahwa Kebijakan Publik tentang peningkatan Pendapatan Petani kelapa lokal ada dasar hukumnya yang mengaturnya ?

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr mengenai Perda No. 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani ?

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah peningkatan kesejahteraan petani itu perlu ? Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa alasannya ?

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah kelemahan dari kebijakan ini Bagaimana solusinya ?

5. Apakah ada dilakukan penyuluhan tanaman sela bagi petani kelapa lokal, diversifikasi kelapa?

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, Apakah tanggul yang dibangun Pemerintah Daerah sudah mencukupi untuk kebun kelapa lokal di Kab. Indragiri Hilir ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Apakah ada pengawasan dari instansi yang berwenang terhadap program yang sudah dijalankan ? Kalau ada dari instansi mana saja ? dan bagaimana pengawasan tersebut berjalan ?

8. Apakah ada partisipasi petani dalam melakukan peremajaan kebun kelapa? dan (dalam program kerja) kenapa peremajaan kebun kelapa hanya dilakukan pada tahun 2011 dan 2012, sementara di tahun 2009 dan 2010 tidak dilaksanakan?

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr. Bagaimana dengan program penerapan teknologi perkebunan berupa pembangunan tanggul dan parit ? apakah sudah tepat sasaran? Berikan alasan?

10. Apakah ada perkumpulan/Asosiasi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir? Kalau ada bagaimana peranan Asosiasi tersebut ?

II. Komunikasi

11. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Perda No. 14 Tahun 2009 tentang peningkatan kesejahteraan petani ?

12. Apakah ada, siapakah yang melakukan sosialisasi? Berapa kali Bapak/Ibu/Sdr mendapatkan sosialisasi ?

13. Dalam menyampaikan informasi apakah petugas konsisten dalam menyampaikannya ?

14. Apakah ada petugas penyuluh yang mensosialisasikan tentang peremajaan kebun kelapa, Tanaman sela, Diversikasi kelapa lokal? kalau ada, apakah sudah dilaksanakan oleh petani , dan kalau belum dilaksanakan? tolong berikan alasannya?

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa yang menjadi penghambat atau pendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan petani ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
1. Implementasi				
	(a) Pengetahuan dan Keterampilan Petani	M. Nopriyanto (Petani kelapa Lokal)	Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan kelapa lokal?	Ulun Kadak suah umpat pelatihan buk ai,.....yang ulun tahu naruskan usaha nan tuhak darai pang.
		Saekun (Petugas penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan)	Apakah Pemerintah ada melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal?	Kegiatan penyuluhan dan pelatihan merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar teknologi budidaya yang ada dapat ditingkatkan serta melakukan diversifikasi produk kelapa yang bernilai ekonomis dan berorientasi pasar seperti gula merah, minyak kelapa murni, santan kara, dan aneka makanan berbahan kelapa.
		Herwanisitas (anggota Komisi B) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	Menurut Bapak bagaimana pengetahuan petani kelapa lokal?	Pengetahuan dan pemahaman petani kelapa lokal mengenai penerapan standardisasi mutu masih rendah. Akibat dari itu, nilai penerimaan pasar dan daya saing terhadap produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir juga masih rendah".
	(b) Kemampuan lembaga petani dalam mengakses permodalan	Tugiyo (Petugas Penyuluh Lapangan)	Bagaimana upaya pemerintah membantu petani kelapa lokal dalam permodalan ?	Sebenarnya kita sudah salurkan bantuan kepada para petani kelapa lokal, namun pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menangani permodalan petani secara keseluruhan. Bantuan yang kita salurkan hanyalah bersifat Ransangan bagi Petani agar lebih Proaktif dalam mencari modal
		Ngadiyo (Dinas Perkebunan Kab. Inhil)		Kita juga sudah pernah menghimbau pihak swasta untuk membantu permodalan petani kelapa local, namun karena keterbatasan anggaran dari perusahaan maka persentase program bantuan kecil

UNIVERSITAS TERBUKA

416113

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Herwanisitas (anggota Komisi B) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir		Dana yang kita anggarkan untuk membantu Petani tidaklah mencukupi untuk seluruh Petani Kelapa Lokal, dimana yang kita bantu hanya bersifat Pilot Project saja
		Luffy (Petani Kelapa Lokal)	Apakah Bapak membutuhkan bantuan modal untuk mengolah kebun kelapa?	Jalas ai kami ni kekurangan modal, buk. Kayak apa Bank handak caya, hidup sehari-hari aja ngaleh. (jelas lah sudah bu, kami kekurangan modal. Bagaimana pihak bank mau percaya, kebutuhan sehari-hari aja sulit).
	(c) Terlaksananya Diversifikasi Tanaman Perkebunan Kelapa	Suparjo (Dinas Perkebunan)	Apakah Program diversifikasi kelapa lokal telah dilaksanakan oleh petani ?	Produk utama petani kelapa lokal kebanyakan kopra dan kelapa bulat, dimana kedua jenis produk ini harganya masih sangat rendah. Seharusnya petani mengembang produk gula kelapa karena permintaanya cukup banyak baik untuk pasar lokal, antar wilayah dan ekspor".
		Tugiyo (BP2KP)		Para petani sudah menanam tanaman sela yaitu nenas, namun karena air pasang yang dalam sehingga tanaman nenas tersebut tenggelam dan menjadi rusak, jadi petani enggan melakukan tanaman sela lagi
	(d) Terlaksananya rehabilitasi kelapa rakyat. peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah	H. Bakri (Anggota DPRD Kab. Indragiri Hilir Komisi B)	Apakah Petani kelapa lokal pernah melakukan peremajaan kelapa mereka?	Bagaimana Petani-petani kelapa lokal tersebut mau melakukan peremajaan kelapa sementara harga kelapa yang diterima petani sangat rendah hanya berkisar Rp. 300-500 per butir sedangkan kopra seharga Rp. 1.000 per kg, sehingga menyebabkan kurang nya motivasi petani dalam mengelola kebun kelapa mereka tersebut secara optimal. Apalagi mau meremajakan kebun kelapa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya (Dinas Perkebunan)	Bagaimana usaha peremajanan kebun kelapa yang dilakukan oleh Pemkab. Indragiri Hilir?	Terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan, dibatasi oleh ketersediaan dana dan sumber daya yang ada.
	(e) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Susilawaty (BP2KP)	Bagaimana penerapan teknologi perkebunan berupa pembangunan tanggul dan parit?	Proyek yang dibangun kebanyakan tidak tepat sasaran, karena tidak dibangun pada kebun kelapa rakyat namun lebih banyak dibangun di areal perkebunan kelapa milik oknum tertentu
		Saekun (BP2KP)		Sistem drainase tidak berjalan dengan baik, parit-parit yang terdapat pada kebun kelapa sudah dangkal dan jumlah paritnya yang sangat sedikit, di perparah lagi dengan masuknya air asin ketika air pasang, dan naiknya permukaan air parit sampai memenuhi lahan kebun sewaktu hujan turun. system drainase pada daerah-daerah yang telah disebutkan di atas sangat buruk. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan tanaman kelapa yang tidak produktif
		Ir. Junaidi (Ketua Komisi B. Anggota DPRD)		Perbaikan dan pembuatan drainase seharusnya mendapat insentif dari pemerintah daerah karena pembuatan salauran drainase sulit untuk dilakukan petani kelapa secara manual. Hal ini dikarenakan perekonomian petani kelapa local kurang mampu dan miskin

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya (Dinas Perkebunan)		Mayoritas pembangunan tanggul mekanik dan normalisasi saluran dikerjakan dan dilaksanakan oleh penyedia dari pihak ketiga yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan umum,. Di dalam pelaksanaannya, seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa hal diantaranya lamanya proses pelelangan umum dan disebabkan oleh pihak ketiga yang lambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak
		Ir. Junaidi (Ketua Komisi B DPRD Kab. Inhil)		Pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang, seperti jalan produksi dan gorong-gorong pada lahan perkebunan untuk mendukung akses distribusi hasil perkebunan masih rendah. Kemampuan pemerintah untuk membangun masih sangat terbatas. Oleh karenanya, sangat diharapkan upaya swadaya dari petani untuk membangunnya
Pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal				
		M. Nopriyanto (petani kelapa lokal)	Apakah bapak/Ibu mengetahui Perda Nomor 14 tahun 2009?	Ulun kadak tahu Buk ai, apanya isi dari Perda Nomor 14 Tahun 2009 tu. Kadak suah ulun umpat Sosialisasinya buk ai. Meitihi isinya gin kadak suah
		Irmansyah (Petani Kelapa Lokal)		kami ni apanya pang buk ai, urang tinggal di daerah terpencil ni kadak suah tahu tentang Peraturan Daerah nang kayak itu. Wadah kami ni jauh buk ai, amun ada petugas datang kesini wah bersyukur bangat kami buk ai, ni apanya pang ada. Sebulan sekali gin ngalih petugas handak kesini buk ai
		Yurniasih (petani kelapa lokal)		saya tahu dan paham isi dari perda tesebut, karena saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Dan memnag kebijakan tersebut sedikit membantu kami dalam mengelola kebun kelapa ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Saekun (BP2KP)		saya tidak mengetahui apa Itu Perda Nomor 14 Tahun2009, lagipula saya tidak pernah dapat sosialisasinya. Kemungkinan karena ini Tupoksinya Dinas Perkebunan, jadi kami dari BP2KP tidak mengetahuinya. Malahan sejak ibu bertanya inilah baru saya tahu bahwa ada Perda yang mengatur tentang peningkatan pendapat Petani kelapa lokal tersebut.
		Surya (Dinas Perkebunan)		Sebenarnya saya mengetahui isi tentang Peraturan Daerah tersebut, hanya saja saya kurang memahami isinya secara jelas. Karena kami juga dari petugas hanya mengartikan masing-masing
		Zulkifli (Komisi B anggota DPRD)		Masyarakat secara umum kurang memahami isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut, karena Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan juga terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi bagi dinas terkait khususnya Dinas Perkebunan untuk mejangkau seleuruh pelosok Kabupaten Indragiri Hilir
Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal di Kabupten Indragiri Hilir				
		Syahroni (Petani kelapa Lokal)	Apakah Petani kelapa lokal memiliki perkumpulan atau semacam asosiasi? Bagaimana perannya?	Sebujurnya kami sudah punya asosiasi kelapa Buk ai, namun keberadaannya kadak jua bepengaruh. Kadang muncul, kadang tanggalam
		Saekun (BP2kp)	Apakah saja upaya yang dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa loka?	Pembinaan selama ini dilakukan bu, namun tidak dilakukan di tiap Kecamatan apalagi tiap Desa , maklumlah bu kalo hanya mengharapkan dana dari Pemerintah saja tidak cukup anggaran untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Apalagi Kabupaten Indragiri Hilir ini yang sangat bergantung dari Transportasi air, dimana kalau air pasang baru bisa jalan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

411613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya Surghana Akmal (Dinas Perkebuanan)		Ada beberapa upaya yang telah kita lakukan bebrerapa tahun terakhir ini sejak Peraturan daerah tersebut diterbitkan antara lain melakukan Penyuluhan ke petani kelapa lokal mengenai Diversifikasi Tanaman kelapa baik secara Vertikal maupun Horizontal, memberikan bimbingan teknis kepada petani kelapa, pembuatan tanggul,dan proram trio tata air
		Andi Kurniawan (petani kelapa lokal)		Aku kadak suah tahu buk ai amun ada Perda nang tu, apalagi program-program nang ibuk tanyakan tuk. Padahal kami ni parak awan Tembilahan Buk ai, tapi kadak suah aku tahu ada program-program tu
		Herwanisitas (komisi B anggota DPRD)		Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membantu petani kelapa lokal dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal yaitu dengan membuat master plan berupa Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini, hanya saja hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan pendapatan petani kelapa lokal
2. Komunikasi				
a.	Kejelasan informasi seputar pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan Petani Kelapa lokal kepada masyarakat terutama Petani kelapa	Syahroni (petani kelapa lokal)	Apakah ada sosialisai perda Nomor 14 Tahun 2009 kepada petani kelapa lokal?	Sosialisasi yang diberikan pemerintah pada kami ni kadak ada buk ai , ditambah lagi petani kelapa nang kayak ulun ni, sekulah sampai SMP narai pang. Kayak apa handak nyambung pandiran tu buk. Majal dah utak ni
		Luffy (petani kelapa lokal		Sosialisasi ini tidak pernah sampai ke kami yang berade di pelosok ini buk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya (dinas perkebunan)		Sosialisasi dari pemerintah daerah ada buk,, hanya saja belum menjangkau seluruh desa yang ada di Indragiri Hilir. Ya biasalah buk kami dibatasi oleh anggaran yang ada
		Yurniasih (petani kelapa lokal)		Sosialisasi sudah dilakukan tetapi belum menyeluruh sampai ke pelosok desa, apalagi desa-desa yang di daerah utara yang dekat dengan laut dan transportasi masih sangat bergantung dengan air pasang
		Susi (BP2KP)		Sudah, Perda Nomor 14 Tahun 20009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal sudah disosialisasikan ke masyarakat bahkan sudah dilaksanakan
b.	Kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada Petani Kelapa Lokal	M. Nopriyanto (Petani Kelapa Lokal)	Bagaimana informasi yang disampaikn petugas dalam mensosialisasikan Perda Nomor 14 Tahun 2009?	Setahu Ulun kadak suah ulun dapat sosialisasi tentang Perda tu Buk ai, petugasnya gin ulun kadak tahu yang mana urangnya " (setahu saya tidak pernah dapat sosialisasi tentang perda itu buk, petugasnya pun saya tidak tahu siapa orangnya)
		Saekun (BP2KP)		kami para petugas bagaimana mau melakukan sosialsiasi ke petani kelapa, karena anggarannya memang tidak ada. Selain itu karena kelapa ini merupakan tanaman tahunan, jadi tidak perlu repot-repot melakukan sosialisasi karena petani sudah mengetahui cara mengolahnya
c.	Ketepatan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Lokal	Nawar (Petani Kelapa Loka)	Bagaimana penyampaian informasi mengenai perda tersebut?	Kalau isi Perda tersebut saya tidak tahu, tetapi kalau kelapa bisa diolah menjadi kopra, gula merah, nata de coco, saya tahu bu. Terus kebun kelapa tu aliran airnya harus lancar dengan membuat parit saya tahu bu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
3. Sumber Daya				
a.	Kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan peningkatan pendapatan petani kelapa lokal	Ngadiyo (dinas perkebunan)	Apakah Bapak mengetahui tentang isi Perda No. 14 Tahun 2009 ?	Ya saya mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal di Kabupaten Indragiri Hilir. Sosialasi berupa pengarahan kepada petani kelapa lokal telah kita laksanakan, hanya saja tidak semua dapat kita laksanakan karena keterbatasan anggaran Pemerintah
		Saekun (BP2KP)		Sebenarnya saya sendiri belum memahami dengan pas apa yang diinginkan oleh Perda tersebut, apalagi mau menyampaikannya kepada petani kelapa lokal, selain itu banyak juga kawan-kawan saya yang akan memasuki usia pensiun sehingga mereka tidak terlalu konsen lagi dalam bertugas
		Surya (dinas perkebunan)		Saya mengetahui tentang Perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut, hanya saja saya tidak memahami secara jelas sehingga sulit juga mensosialisasikan secara utuh dan tepat tujuan lahirnya Peraturan Daerah tersebut
b.	Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan Petani Kelapa Lokal mengenai Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal	Saekun (BP2KP)		Sebenarnya saya sendiri baru mengetahui adanya Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini dari ibu, saya juga tidak pernah mendapatkan sosialasinya dari Dinas Perkebunan Kab. Indragiri Hilir. Apalagi saya mau mensosisasikannya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Suparjo (dinas Perkebunan)		Karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelatihan maupun sosialisasi program-program peningkatan pendapatan petani kelapa lokal, maka kami tidak mampu memberikan sosialisasi pada setiap petani pada tiap Kecamatan
c.	Jumlah personil yang diturunkan dalam implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal	Surya (dinas perkebunan)	Bagaimana dengan Petugas aparatur yang dimiliki Pemda telah memenuhi dengan kebutuhan	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki keahlian mengendalikan organisme pengganggu tanaman, karena memang belum ada aparatur yang berlatar belakang pendidikan itu
		Saekun (BP2KP)	Apakah jumlah personel yang diturunkan untuk memberikan sosialisasi sudah mencukupi	Petugas penyuluh perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat kurang secara kuantitas. Sebenarnya hal ini dapat diatasi oleh Pemerintah dengan mengangkat Petugas Penyuluh Swadaya dari Tokoh Masyarakat ataupun Petani Kelapa lokal yang mampu memberikan sosialiasi mengenai isi Perda dimaksud
4. Sikap				
a.	Persepsi Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal	Wagino (BP2KP)	Bagaimana koordinasi petugas yang lama dengan yang baru dalam melaksanakan pembinaan pada petani kelapa lokal	Kurangnya koordinasi antara petugas yang lama dengan yang baru sehingga dalam melaksanakan pembinaan kepada Petani kelapa lokal dapat menimbulkan kesalahan persepsi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya (dinas perkebunan)	Apa manfaat dari terbitnya Perda No. 14 Tahun 2009	Manfaat yang didapat dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 ini adalah dapat mendorong para petani kelapa lokal yang semula hanya mengolah kelapa menjadi kopra sekarang bisa bermacam-macam produk olahan yang mempunyai nilai ekonomi baik
		Luffy (Petani Kelapa Likal)		Ya lebih enak kalo dalam perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut ada mengatur tentang harga kopra buk, jadi ada standarisasinya. Kadak sakahandak perusahaan hajak menentapkan harga kopra. (Ya lebih enak kalau ada perda Nomor 14 Tahun 2009 tersebut ada yang mengatur tentang harga kopra bu, jadi ada standirisasinya. Tidak semau perusahaan saja menetapkan harga kopra)
		Nopriyanto (Petani Kelapa Lokal)		Diharapkan pemerintah dapat menerbitkan standar harga Kopra perkilonya, sehingga kami petani ni kadak menjerit lagi. Nyaman jua agin makan sehari awan anak sekulah
		Andi Kurniawan (Petani Kelapa Lokal)	Bagaimana dengan Pembangunan tanggul dan pengerukan/normalisasi sudah sesuai dengan yang diharapkan	Masalah kami disini adalah parit yang tesumbat buk, jadi ngaleh air pasang tu handak turun. Pas air pasang maka am tanggalam tu pang jalasnya dah kabun nyiur kami ni".Masalah kami di sini adalah parit yang tidak mengalir, jadi susah air pasang mau mengalir. Pada saat air pasang maka kebun kelapa kami pun ikut tenggelam.
		Herwanisitas (Anggota DPRD Komisi B)	Bagaimana cara supaya masyarakat lebih mudah memahami Perda No. 14 Tahun 2009 tentang kesejahteraan petani itu sendiri	Agar masyarakat lebih mengetahui, meyadari dan akhirnya melaksanakan, maka sebaiknya pengetahuan tentang perkebunan kelapa ini dimasukkan dalam kurikulum anak sekolah terutama SMK, jika sosialisasi dari tingkat yang paling bawah seperti anak-anak, hal tersebut pasti akan terbawa hingga mereka dewasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
b.	Sikap Petani Kelapa Lokal di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang peningkatan pendapatan petani kelapa lokal	Udin (Petani Kelapa Lokal)	Menurut Bapak / Ibu bagaimana isi Perda Nomor 14 Tahun 2009 ? tolong jelaskan?	Peraturan tersebut sangat perlu karena ulun tebantu khususnya pada program peremajaan kebun. Memang kebun kami ni sudah lawas, dari zaman paninian baharik. (Peraturan tersebut sangat perlu bagi kami petani khususnya pada program peremajaan kebun. Memang kebun kami ni sudah lama, dari zaman nenek kami)
		Rahmataniah (Petani Kelapa Kola!)		Bahwa Perda tersebut sangat berguna sekali untuk kesejahteraan petani kelapa lokal, namun perda tersebut belum berjalan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada petani kelapa lokal
5.	**Faktor Lain**			
a.	Faktor Pendukung	Herwanisitas (Anggota DPRD Komisi B)	Menurut Bapak, apa faktor pendukung keberhasilan program tersebut ?	Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi menurut saya pentingnya pengetahuan Petani Kelapa Lokal dalam mengolah kelapa lokal mulai dari buah kelapa, batang kelapa, sabut, lidi dan lain sebagainya agar dimasukkan dalam program sekolah khususnya SMK Pertanian yang ada di Kecamatan Kempas
		Surya (Dinas Perkebunan)		Keberpihakan Pemerintah dalam menganggarkan dalam APBD mengenai Pendidikan dan pelatihan petani kelapa lokal, Pembuatan Tanggul, peremajaan Kebun kelapa yang sudah tua, dan bantuan teknologi modern
b	Faktor penghambat	Susi (BP2KP)	Menurut Bapak/ Ibu, apa faktor penghambat keberhasilan program tersebut ?	Program pembuatan tanggul sudah bagus, hanya saja sasarannya belum tepat sasaran karena ada kong kali kong penempatan tanggul yang bisa berpindah ke tempat lain

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

41613

41613

No	Indikator Penelitian	Nara Sumber	Pertanyaan	Jawaban Responden
		Surya (Dinas Perkebunan)		Sebenarnya perda ini sudah bagus karena ada road map bagi Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani kelapa lokal, hanya saja respon dari masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masih sangat kurang
		Ngadio (Dinas Perkebunan)		Sumberdaya manusia petani kelapa lokal masih sangat rendah sehingga sosialisasi yang kita berikan kurang nyambung
		Suparjo (Dinas Perkebunan)		Karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelatihan maupun sosialisasi program-program peningkatan pendapatan petani kelapa lokal, maka kami tidak mampu memberikan sosialisasi pada setiap petani pada tiap Kecamatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

FOTO KONDISI PERKEBUNAN KELAPA DI KAB. INDRAGIRI HILIR - RIAU

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41613

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka